



# Indonesia Humanitarian Report 2008

[ Versi Bahasa Indonesia ]



Penanggungjawab : Hening Parlan

Koordinator : Barry Aditya

Penulis : Hening Parlan  
Victor Rembeth  
Khairullah

Data : Adi Rosadi  
Surya Rahman Muhammad  
Adi Kurnia

Editor Bahasa : Aminudin Kirom

Desain dan Layout : Adi Rosadi

Keuangan : Yani

OC : Mohamad Fauzi

Translater : Irawan  
Susan  
Deni WK

:

## Pengantar

*Tapak kecil kami mulai melangkah .....*

Demikian hal yang paling tepat untuk kami sampaikan sebagai wujud dari tekad kami untuk melakukan perubahan. Kami memulai tujuan besar yang menjadi misi Humanitarian Forum Indonesia untuk menjadi salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia dengan langkah kecil, membuat laporan atas perjalanan respon bencana di Indonesia. Laporan ini ibarat potret dari pelaksanaan seluruh pihak di Indonesia.

Momentum ini sekaligus menandai *Interfaith Mission*, sebuah misi kemanusiaan ke Gaza lintas agama yang berangkat sehari sebelum launching laporan ini dimana dokter dan perawat dari Muhammadiyah, YEU dan RS. Bethesda sebanyak 7 orang memulai misi kemanusiaannya. Sementara kami dengan hasil analisisnya melaporkan respon bencana di Indonesia yang ternyata belum sepenuhnya menggunakan nilai-nilai Standart Sphere, namun kita tak perlu berkecil hati karena kita sudah memulainya dengan benar. Terlebih bila kita lihat bahwa pengarusutamaan Pengurangan Risiko-pun belum lama dilaksanakan di Indonesia maka laporan ini tak terlalu mengecewakan.

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan buat teman-teman yang selama dua bulan mengumpulkan dan melakukan verifikasi data. Mereka adalah Adi Kurnia, Adi Rosadi, dan Kang Oya. Juga buat Barry yang menjadi koordinator dari event ini menjadi orang yang paling sibuk dalam menyiapkan segalanya. Tak lupa juga buat Yani dan Ozi yang full time dan sepenuh hati menjad seksi sibuk. Juga buat team di HOPE yang tak bisa di sebutkan satu – persatu. Buat Oxfam GB yang memberikan suport buat kami untuk launching acara ini juga kami sampaikan terimakasih. Oxfam GB datang tepat waktu, karena kami sebagai lembaga baru tak sedikitpun membayangkan akan dapat support dadakan seperti ini. Oxfam GB adalah sahabat yang memahami. Buat bang Patris dan mas Joni, terimakasih atas suportnya

Salam,

**Hening Parlan**

Direktur Eksekutif

# Indonesia Humanitarian Report 2008



## **BAB I** **LATAR BELAKANG**

## Humanitarian Report 2008

### I. Latarbelakang

Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau. Wilayah yang membentang dari ujung barat Pulau Sumatera hingga Merauke, Papua itu terbagi ke dalam 33 provinsi, 73 kabupaten, 246 kota dan 70.611 desa. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta berada diantara dua benua, Asia dan Australia. Wilayah kepulauan Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik (*the Pasific Ring of Fire*) dan merupakan letak pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Letak geologis inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung apa aktif dan tentu saja sebagai salah satu Negara dengan kejadian gempa yang tinggi di dunia.

Jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2005 mencapai 219.204,7 juta jiwa<sup>1</sup>. Jumlah tersebut bertambah terus dan mencapai 227. 779,1 juta jiwa pada tahun 2008 dan diprediksikan akan menjadi 247, 572, 4 juta jiwa pada tahun 2015<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara sebagian kecil lainnya tersebar di pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

Letak Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dan jumlah penduduk yang makin bertambah tiap tahun makin menambah kerentanan serta tekanan ekonomi, sosial, budaya dan politik bila tidak terkelola dengan baik. Dalam konteks kejadian bencana dan jatuhnya korban, tampaknya ada kecenderungan yang sama baik ditingkat global maupun nasional. Kecenderungan sama yang dimaksud adalah terjadi lonjakan jumlah kejadian bencana namun mengalami penurunan jumlah korban (meninggal).

Bila pada tahun 2006 tercatat 162 kali bencana, maka di sepanjang 2007 naik lagi menjadi 205 kali bencana. Jumlah ini mengalami lonjakan hampir dua kali lipat di tahun 2008 yang tercatat menjadi 408 kejadian bencana. Namun bila dilihat dari jumlah korban, mengalami penurunan. Bila tahun 2006 korban meninggal tercatat ada 7.618 orang, tahun 2007 korban meninggal sebanyak 766 orang, dan mengalami penurunan lagi di tahun 2008, menjadi 321 orang.<sup>3</sup>

Kerugian ekonomi dan materi akibat peristiwa bencana tersebut juga sangat besar. Untuk banjir Jakarta (Februari 2007) saja, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp

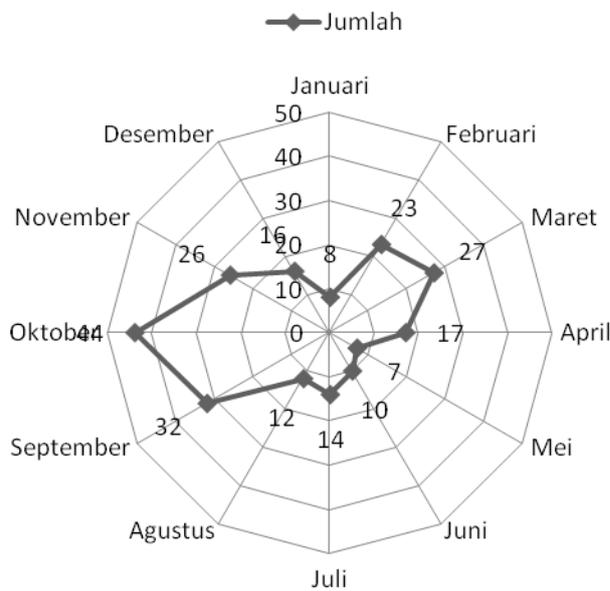
<sup>1</sup> <http://www.datastatistik-indonesia.com>

<sup>2</sup> Proyeksi Penduduk, BPS, Bappenas, UNFPA, 2005

<sup>3</sup> Data Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Departemen Kesehatan RI (2008)

8,6 triliun. Rusaknya sarana dan prasarana umum dan lumpuhnya sebagian aktifitas ekonomi masyarakat menambah lonjakan kerugian ini. Tidak lama berselang terjadi bencana gempa di Sumbar (Maret 2007) yang menelan korban jiwa 52 orang dan kerugian tidak kurang dari Rp 1,6 Triliun. Sementara itu bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung di Jateng, sejak akhir Desember 2007 hingga awal Januari 2008 menelan puluhan korban jiwa dan menyebabkan kerugian material sebanyak Rp 776,614 miliar. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bencana seperti gagal panen, gagal tanam, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, dan konflik sosial, selama tahun 2007 menimbulkan kerugian sebesar Rp 294 miliar. Bencana tersebut terjadi di seluruh kabupaten.<sup>4</sup> Demikian juga kejadian bencana terjadi di banyak wilayah lainnya dengan skala dan kerugian yang berbeda-beda.

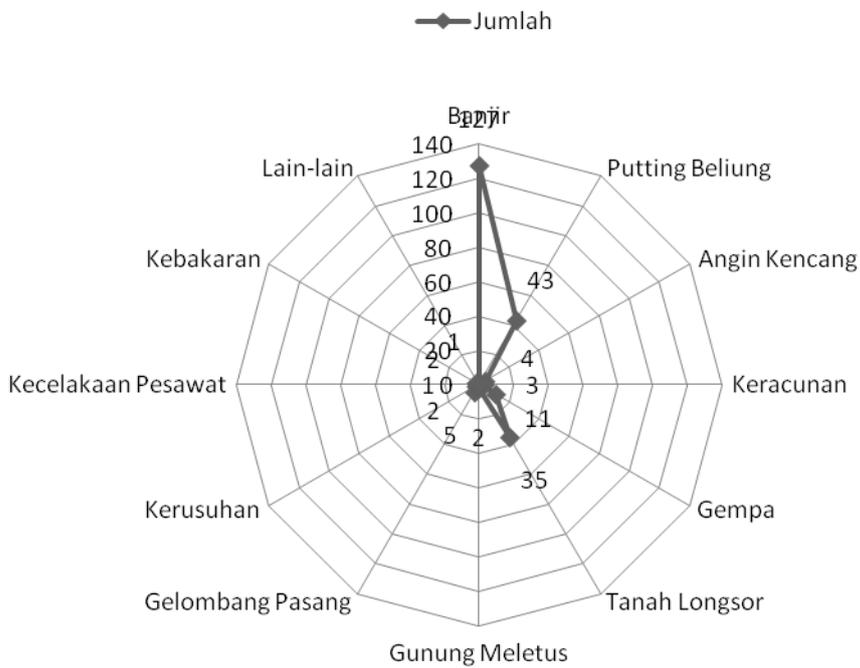
### Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2008



Menurut data yang dikumpulkan Humanitarian Forum Indonesia, jumlah bencana adalah 236 kali dan di bulan Oktober adalah jumlah yang paling banyak.

<sup>4</sup> Sumber : MPBI (2008) data diolah dari berbagai sumber.

## Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2008 berdasar Klasifikasi Jenis Bencana



Sedangkan dari data terlihat bahwa jumlah bencana terbesar adalah banjir diikuti dengan puting beliung dan tanah longsor.

# Indonesia Humanitarian Report 2008



**BAB II**

**KONTEKS LAPORAN HUMANITARIAN**

## II. Konteks Laporan Humanitarian

### 2.1. Pengantar Definisi Kemanusiaan

Definisi Kemanusiaan sangat luas sehingga apapun kegiatannya yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia bisa dikatakan sebagai kegiatan kemanusiaan. Karena luasnya definisi tersebut, setiap orang atau lembaga bisa mendefinisikan tentang makna kegiatan kemanusiaan yang dilakukan. Ukuran tentang keberhasilan atas kegiatan kemanusiaan menjadi sulit diukur. Penilaian tentang keberhasilan sebuah kegiatan kemanusiaan harus didasarkan pada indikator-indikator tertentu yang dalam realitasnya tidak mudah untuk mencapainya. Sebaliknya, lebih mudah untuk menilai kegagalan sebuah kegiatan kemanusiaan. Untuk penilaian tentang kegagalan ini karena seringkali orang mudah terseret pada penilaian-penilaian subyektif. Mestinya hal ini tidak perlu terjadi jika penilaian tersebut konsisten mengacu pada indikator-indikator yang sudah menjadi konsensus bersama.

Lahirnya Piagam Kemanusiaan (*Humanitarian Charter*) menjadi titik awal dari landasan kegiatan kemanusiaan. Piagam Kemanusiaan yang berisi tentang prinsip – prinsip dan ketentuan – ketentuan hukum humaniter (kemanusiaan) internasional, hukum internasional hak asasi manusia, hukum pengungsi lintas batas dan *Kode Perilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan organisasi non pemerintah (ORNOP) dalam bantuan bencana (the Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non Government Organisations in Disaster Relief)*.

Piagam tersebut menggambarkan prinsip-prinsip inti yang mengatur tindakan kemanusiaan dan menegaskan kembali hak-hak penduduk yang terkena dampak bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia (termasuk konflik bersenjata), terhadap perlindungan dan bantuan. Piagam itu juga menegaskan hak-hak penduduk yang terkena dampak bencana. Dalam perkembangannya Piagam Kemanusiaan ini akan lekat dengan Konvenen Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 dan Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Convenent on Economic, Social and Cultural Right*) 1966.

### 2.2. Standard Minimum Sphere

Standard Minimum (Minimum Standard) yang kemudian disebut SPHERE, terbit pertama kali pada tahun 2000 yang kemudian menjadi kerangka kerja operasional untuk kualitas dan akuntabilitas dalam kegiatan kemanusiaan. SPHERE dibuat dengan mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana termuat pada dokumen Piagam Kemanusiaan (*Humanitarian Charter*). Prinsip Piagam Kemanusiaan ini disusun dengan dilatarbelakangi tujuan untuk (1) Mencegah atau mengurangi penderitaan yang timbul akibat konflik atau bencana, dan kenyataan bahwa (2) warga sipil yang tertimpa, mempunyai hak atas perlindungan dan bantuan.

Piagam Kemanusiaan ini dilandasi oleh prinsip-prinsip bahwa (1) penduduk terkena bencana mempunyai hak untuk kehidupan yang bermartabat, (2) Perbedaan antara pemanggul senjata dan bukan, dan (3) Prinsip tidak mengusir paksa. Peran dan Tanggung Jawab Piagam kemanusiaan adalah “kesepakatan yang mengikat” bagi semua pihak yang menginginkan usaha-usaha peredaman risiko bencana, khususnya penanganan darurat dapat berjalan dengan baik. Di dalam piagam kemanusiaan Sphere tersebut mengandung beberapa nilai, dimana antara masyarakat korban, negara, lembaga kemanusiaan, maupun pihak yang bertikai mempunyai peran dan tanggungjawab yang saling melengkapi dan bekerjasama.

Standard Kemanusiaan Sphere tersebut terdiri dari (1) Standar Minimum Semua Sektor, (2) Pasokan Air Bersih, Sanitasi dan Penyuluhan Kebersihan, (3) Ketahanan Pangan, Gizi dan Bantuan Pangan, (4) Hunian, Penampungan dan Bantuan Non Pangan dan (5) Pelayanan Kesehatan. Untuk melaksanakannya diperlukan prasyarat atau indikator pelaksanaan yaitu partisipasi, pengkajian awal, respon, penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan, supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personel.

Di Indonesia, hal ini belum diterapkan secara mutlak. Banyak lembaga nasional dan internasional, juga lembaga-lembaga PBB sudah menggunakan Piagam Kemanusiaan dan Standard – Standard Minimum ini, namun masih banyak juga yang belum menerapkannya termasuk pemerintah. Untuk melihat sejauhmana penerapan Piagam Kemanusiaan dan Standard minimum tersebut di Indonesia, Humanitarian Forum Indonesia menyusun *Indonesian Humanitarian Report 2008* yang merupakan gambaran dari capaian positif (*positive change*) dan evaluasi kegiatan respon bencana.<sup>1</sup> Laporan ini sengaja hanya dibatasi pada lingkup kegiatan respon bencana dengan harapan bisa mendapatkan gambaran yang lebih spesifik dan tajam. HFI menyadari bahwa laporan ini belum mencerminkan keseluruhan pelaksanaan atau penerapan piagam kemanusiaan dan standard-standard minimum dalam respon bencana.

## 2.2. Tujuan

- Untuk mendapatkan gambaran hasil evaluasi kegiatan respon bencana dengan menggunakan 8 nilai standard yaitu : 1). partisipasi, 2). pengkajian awal, 3). respon, 4). penentuan sasaran, 5). pemantauan, 6). evaluasi, 7). kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan, serta 8). supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personnel.
- Mendapatkan gambaran pelaksanaan standard tersebut dalam setiap cluster, dimana clusternya terdiri dari cluster; 1. kesehatan; 2. Makanan dan nutrisi; 3.

<sup>1</sup> HFI hanya akan fokus pada respon bencana, karena apabila kita bicara soal kemanusiaan akan sangat luas dan sulit dianalisis.

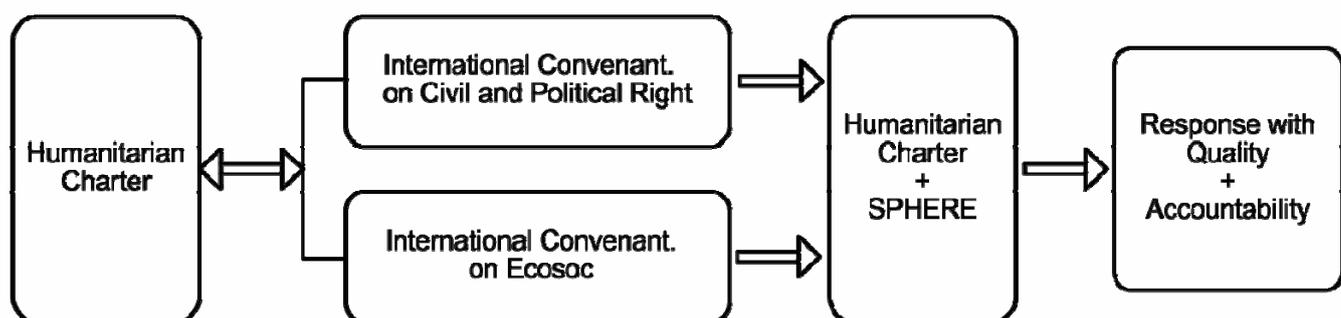
Pendidikan; 4. Pertanian; 5. Air dan sanitasi; 6. Tempat hunian; 7. Bantuan pangan dan 8. kluster telekomunikasi.

- Mendapatkan gambaran atas hubungan masing - masing cluster pada setiap indikator sphere serta melihat bagaimana gambaran dari pelaksanaan respon tersebut setiap cluster-nya.

### 2.3. Metodologi

Laporan ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian eksplanasi dengan analisis media framing. Keduanya merupakan analisis yang menggunakan basis data yang diperoleh dari berbagai media dan bertujuan untuk menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.<sup>2</sup> Dengan dasar tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan 8 standard minimum sphere dimana keseluruhannya memiliki 36 indikator. Namun demikian penggunaan 8 standard minimum sphere ini hanya merupakan besaran saja, karena bila analisisnya sampai mendalam – sampai pada nilai sesungguhnya Sphere, maka data tak akan pernah kita dapatkan, karena data yang di dapat hanya mengungkapkan deskripsi awalnya saja.

Data kami ambil dari berbagai media dan berbagai departemen mulai 1 Januari 2008 – 31 Desember 2008. Konsistensi data kami susun dengan menggunakan level nasional - daerah dengan jumlah data dasar 10 media dan departemen.



<sup>2</sup> Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Ir. I. Made Wiraartha, M.Si.

# Indonesia Humanitarian Report 2008

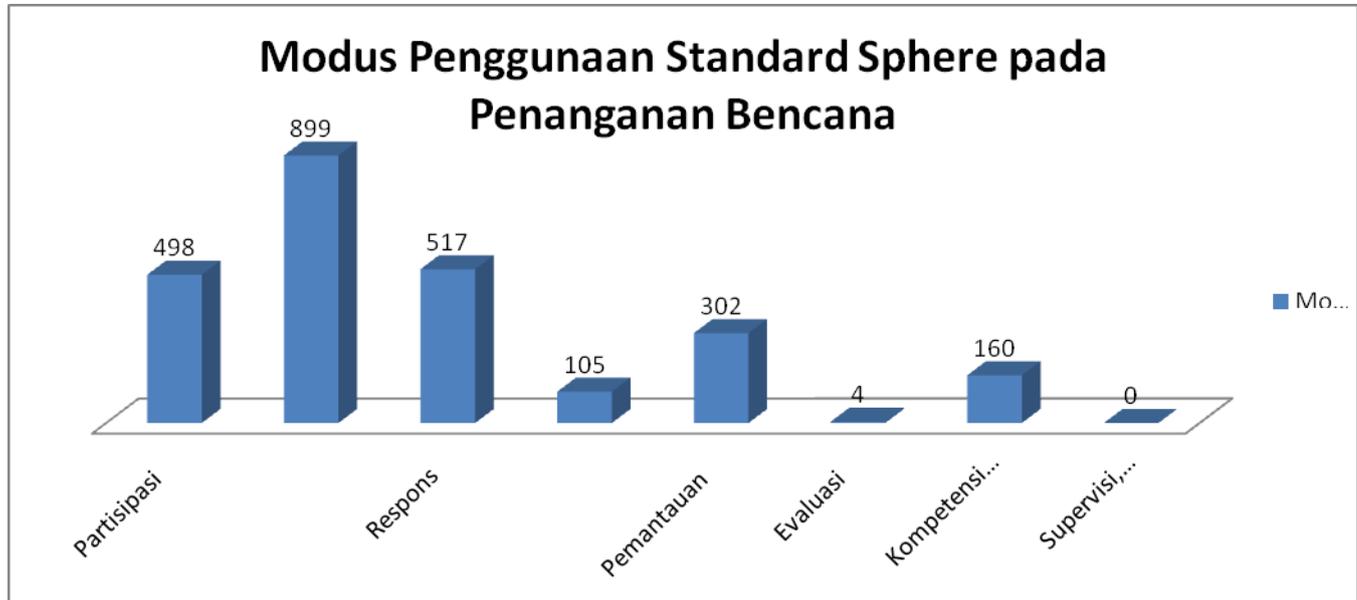


## **BAB III LAPORAN**

### III. LAPORAN

#### 3.1. Rangkuman Eksekutif

##### 3.1. Pelaksanaan 8 indikator standard Sphere Tahun 2008



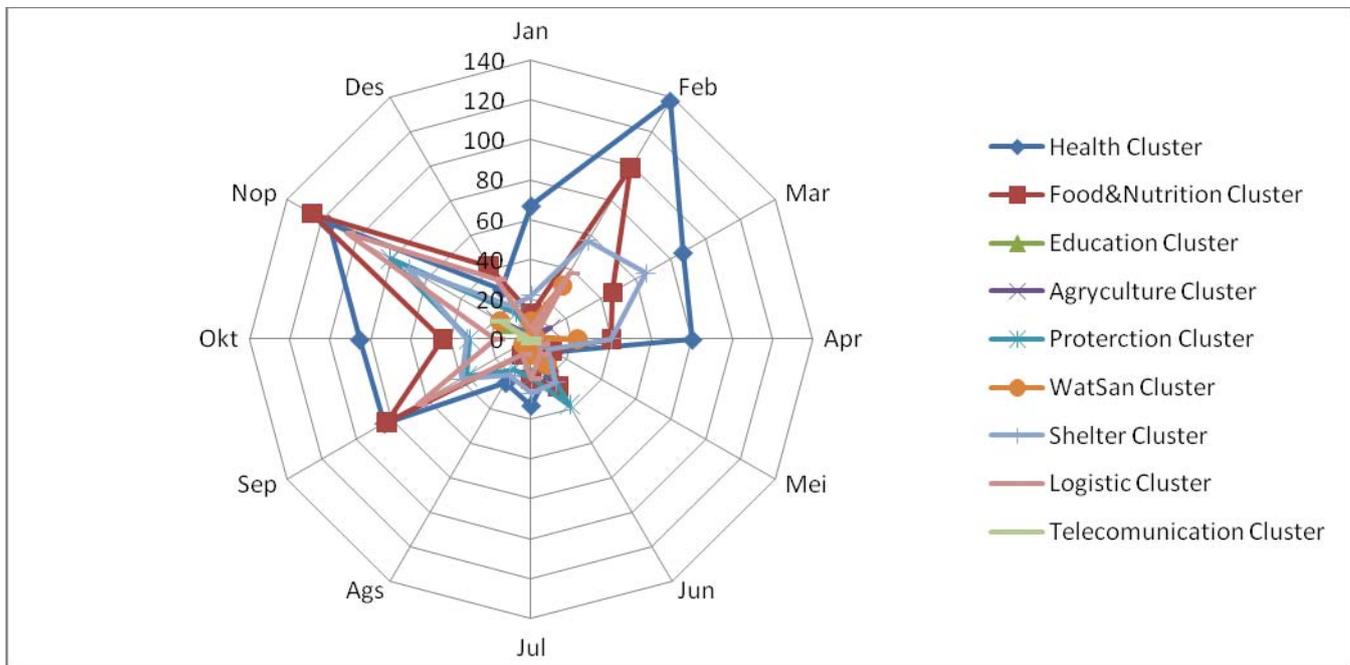
Matrik diatas merupakan gambaran data selama satu tahun yaitu Januari 2008 – Desember 2008 dengan mengukur pelaksanaan kegiatan respon yang kemudian dimasukkan dalam indikator nilai Sphere yang terdiri dari partisipasi, pengkajian awal, respon, penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan, serta supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personel. Dari delapan indikator, masing-masing memuat sub indikator dan dengan sub indikator tersebut kemudian dilakukan analisis. Matrik tersebut adalah gambaran nyata dan sangat fluktuatif dimana kondisi respon di Indonesia masih memprihatinkan dan memerlukan banyak pembenahan meskipun harus kita akui bahwa beberapa sub indikator telah dilaksanakan dengan baik.

- **Indikator partisipasi:** berdasarkan data yang terkumpul menunjukkan bahwa partisipasi telah dilaksanakan dengan baik dalam merespon bencana. Keberhasilan Indikator ini terlihat dari tingginya pemberian bantuan yang harus mencerminkan kebutuhan, masalah dan nilai. Dari data yang berhasil diolah terlihat sub indikator ini memiliki peringkat/nilai tertinggi. Sedangkan pada sub indikator program bantuan dimana bantuan yang dirancang harus memaksimalkan keterampilan dan kemampuan setempat menunjukkan nilai yang stabil namun rendah.
- **Indikator pengkajian awal:** Dari 10 sub indikator yang ada, terlihat bahwa pengkajian dengan mempertimbangkan tanggungjawab pemerintah setempat menduduki peringkat atau nilai tertinggi. Ironisnya, pengkajian yang didasarkan hak nilainya sangat rendah pada seluruh bulan. Hal ini menunjukkan bahwa respon bencana masih dilihat sebagai 'bantuan semata' bukan sebagai tindakan

yang didasarkan sebagai sebuah implementasi dari pelaksanaan hak. Padahal bila dikaitkan dengan UU No. 2004 tahun 2007 mengamanahkan bahwa 'rasa aman dan terlindungi adalah hak asasi'.

- **Indikator respon**, nilai tertinggi ada pada sub indikator program *fokus penyelamatan hidup atau nyawa*, kemudian diikuti oleh *ada koordinasi dan pertukaran informasi, proyek di rancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan*. Sedangkan lembaga yang tidak dapat memenuhi standard diharapkan menginformasikan ke lembaga lain. Adapun nilai paling rendah ada pada sub indikator *dalam situasi konflik bantuan harus peka terhadap situasi*.
- **Indikator penentuan sasaran**, kriteria penentuan sasaran harus memerhatikan analisis kerentanan. Data yang ada menunjukkan indikator ini mempunyai nilai tertinggi. Diikuti dengan mekanisme penentuan sasaran disepakati bersama dan sistem distribusi dipantau. Sedangkan pada mekanisme penentuan sasaran, tidak boleh mengabaikan martabat, yang dalam hal ini mempunyai nilai terendah.
- **Indikator pemantauan**; menggambarkan bahwa ada sistem informasi yang baik atau informasi laporan kegiatan respon banyak yang dikumpulkan tepat waktu. Sayangnya hal ini tidak didukung dengan aliran informasi yang memintakan pendapat semua pihak karena ternyata nilainya sangat rendah.
- Yang menarik pada grafik diatas adalah soal **evaluasi**, karena basis data yang dikumpulkan pada saat evaluasi tidak mengacu pada tujuan dari respon atau proyek yang dilaksanakan.
- Sedangkan pada **indikator kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan** mengandung tiga sub indikator yaitu pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi teknis, dimana hal ini tergambar paling tinggi nilainya. Meski demikian untuk sub indikator staf memahami potensi ketegangan dan sumber konflik serta staf mengenali tindakan yang melecehkan, diskriminatif atau menyalahi aturan nilainya sangat rendah, ini menunjukkan kalau staf lapangan kurang memahami kerentanan dan kebijakan.
- Sedangkan pada **indikator supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personel**, mempunyai nilai yang sangat rendah. Ini menggambarkan bahwa soal asuransi, kenyamanan kerja serta supervisi tidak didapatkan.

### 3.2. Gambaran Pelaksanaan 9 cluster selama satu tahun

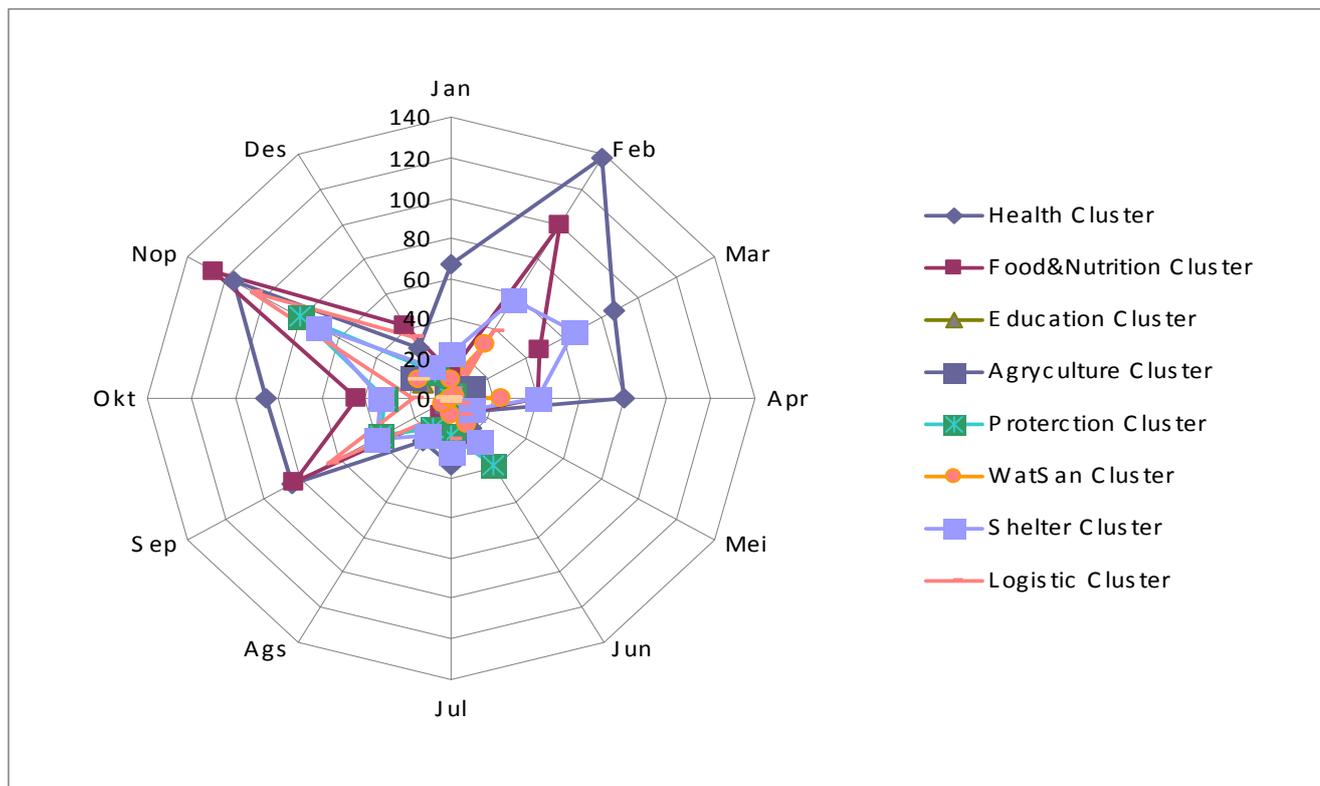


Penilaian cluster ini didasarkan pada bagaimana pelaksanaan respon bencana pada setiap cluster. Cluster yang dimaksud adalah sektor, kesehatan, makanan dan nutrisi, pendidikan, pertanian, perlindungan, air dan sanitasi, tempat hunian, kebutuhan logistik dan telekomunikasi.

Di lingkungan Badan-badan PBB dan di berbagai negara cluster yang dipakai ada 19 namun demikian cluster yang dipakai untuk menganalisis saat ini hanya sembilan. Hal ini semata-mata di dasarkan pada kebiasaan dari UN OCHA – dan organisasi UN lainnya yang biasa menggunakan cluster tersebut dalam mengklasifikasikan kegiatan dan respon bencana.

Tentu saja semakin banyak cluster yang dipakai semakin lengkap pula informasi yang bisa dikumpulkan untuk dianalisis. Namun demikian karena alasan kebiasaan sebagaimana yang dilakukan UN OCHA dan pertimbangan praktis lainnya, penggunaan cluster hanya dibatasi 9 (sembilan) saja. Tentu saja hasil analisisnya tidak akan selengkap bila menggunakan 9 cluster, tetapi hal ini jelas lebih rumit serta membutuhkan lebih banyak waktu untuk menganalisisnya.

### 3.3. Hubungan Sphere dengan Indikator



Dalam upaya mendapatkan gambaran atas hubungan masing - masing cluster pada setiap indikator sphere serta melihat bagaimana gambaran dari pelaksanaan respon tersebut setiap cluster-nya, maka data yang tersedia dihubungkan antara masing-masing cluster dan pencapaian indikator Sphere yang ada. Dari 8 Indikator yang ada, maka terdata bahwa yang paling tinggi dicatat dalam pelaksanaan Sphere di berbagai cluster mencakup 3 elemen utama, yaitu Partisipasi, Pengkajian Awal dan Respons. Dari data 6 clusters yang ada, 5 diantaranya mencatat adanya elemen 3 Indikator Sphere ini, yaitu pada Cluster Food and Nutrition, Education, Protection, WatSan, Logistics dan Telecommunication. 1 Cluster, yaitu Health, mencatat 4 indikator Sphere, yaitu Partisipasi, Pengkajian Awal, Penentuan Sasaran dan Respons,

Dari data yang tersedia, 4 indikator tidak tercatat sama sekali dalam semua clusters yang ada, yaitu pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan, serta supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personnel. 1 indikator Sphere, yaitu Penentuan Sasaran, hanya dicatat sekali dari ke 6 clusters yang ada. Bila data ini benar, maka pelaksanaan dan pemenuhan Sphere berdasarkan indikator-indikator yang tercatat masih sangat memprihatinkan karena ketiadaan atau rendahnya penyertaan 5 indikator yang justru sangat menunjang keberlanjutan sebuah upaya pengelolaan bencana yang efektif dan sistemik.

Ketiadaan indikator Pemantauan dan Evaluasi sudah barang tentu akan menurunkan nilai-nilai indikator Partisipasi, Pengkajian awal, dan Respons. Artinya sebuah upaya

pengelolaan bencana menjadi sangat rentan untuk bisa menghasilkan sebuah sistem yang baik bila aspek pemantauan dan evaluasi tidak disertakan. Kualitas dan efektifitas distribusi dan pengelolaan bantuanpun akan tidak maksimal bila indikator seperti kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan, serta supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personnel tidak ada.

Hubungan antara pelaksanaan Sphere berdasarkan data yang ada di setiap clusters menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk menghadirkan standard baku minimum pelaksanaan Sphere. Ketidakhadiran 4 indikator Sphere dalam pelaksanaan program kemanusiaan di Indonesia sepanjang tahun 2008 menunjukkan bahwa pengenalan, pemahaman dan integrasi nilai-nilai Sphere masih perlu untuk terus dimantapkan dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada.

# Indonesia Humanitarian Report 2008



## **BAB IV** **KERANGKA KEBIJAKAN**

#### IV. Kerangka Kebijakan

Upaya dan langkah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan humanitarian perlu didukung melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang terkait. Hal ini sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai landasan dalam rangka merealisasikan suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, demikian pula halnya dengan kegiatan-kegiatan humanitarian yang akan dilaksanakan di Indonesia. Pada bagian ini akan dilakukan analisis berdasarkan kerangka regulasi yang sudah disusun dari berbagai hirarki peraturan perundang-undangan dan berbagai isu yang dipandang relevan. Dari hasil pengumpulan data regulasi yang sudah dilakukan, terdapat 69 produk peraturan perundang-undangan yang diklasifikasi ke dalam 4 kategori isu yaitu kemanusiaan, bencana, tata ruang dan perubahan iklim. Secara hirarkis, regulasi yang sudah dikumpulkan meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (INPRES). Sedangkan kerangka waktu berbagai regulasi tersebut yaitu antara tahun 2005 hingga tahun 2008. Untuk unit analisis yang dijadikan pembahasan yaitu regulasi-regulasi yang sudah dikategorisasikan ke dalam 4 isu di atas. Masing-masing kategori tersebut akan coba dilakukan analisis terhadap kerangka regulasi sehingga dapat diperoleh gambaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Perinciannya sebagai berikut:

**Kategori Kemanusiaan (non bencana).** Dari hasil pemetaan regulasi terkait isu kemanusiaan terdapat beberapa kebijakan yang sudah diatur, antara lain, diskriminasi ras dan etnik, perdagangan orang, pengesahan beberapa konvensi internasional, perlindungan saksi dan korban, anti kekerasan terhadap perempuan, kasus pengusutan kematian Munir dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, dan seleksi anggota komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Dari pemetaan regulasi dan isu tadi, terdapat kebijakan yang diatur dalam beberapa regulasi yang saling terkait satu sama lain. Regulasi yang berbeda itu memang diperlukan untuk mengatur permasalahan yang lain pula. Pada kerangka regulasi kategori ini meliputi berbagai isu spesifik yang beragam yang mengatur antara isu dengan isu secara terpisah dan tidak adanya keterhubungan. Namun terdapat pula sebuah isu yang diatur dengan beberapa ketentuan. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan dinamika sosial dan politik. Kondisi ini tentunya menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kemanusiaan di Indonesia. Ke depan, nampaknya diperlukan kebijakan mengenai kemanusiaan yang lebih integral dan komprehensif

**Kategori Bencana.** Berdasarkan pemetaan regulasi yang terkait dengan penanganan kebencanaan di Indonesia dapat dinilai bahwa kebijakan kebencanaan sudah cukup banyak. Kondisi ini pada mulanya dipicu dengan adanya peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pada tanggal 26 Desember 2004. Merespon terhadap peristiwa bencana yang sangat besar tersebut maka Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai penanganan kebencanaan di

Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Padahal dari sisi kebijakan perencanaan pembangunan secara nasional belum terdapat kebijakan penanganan kebencanaan di Indonesia. Bila dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 tidak diperoleh materi secara khusus mengenai penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia. Di dalam RPJMN Tahun 2004-2009 itu hanya sedikit memuat kebijakan mengenai penanganan kebencanaan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias akibat peristiwa bencana tersebut. Namun demikian, terdapat klausul dalam dokumen tersebut yang menyatakan bahwa penanganan kebencanaan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dilakukan melalui upaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun melalui kebijakan khusus dan tersendiri. Atas dasar klausul ini pula dijadikan landasan regulasi lahirnya Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks perencanaan, sangat strategis penyusunan RPJMN selanjutnya yaitu RPJMN Tahun 2010-2014 dengan mengakomodasikan dan mengarusutamakan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen kebijakan secara khusus dan komprehensif.

Menyusul peristiwa bencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, terjadi gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006. Untuk melakukan penanganan kebencanaan di kedua provinsi tersebut maka dikeluarkan regulasi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DIY dan Provinsi Jateng. Kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah adalah Keppres penyelesaian masalah lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur yang sampai sekarang masih menyisakan banyak masalah itu.

Dari gambaran di atas nampak bahwa penanganan bencana di Indonesia pada mulanya masih ditangani secara parsial dan melalui suatu badan ad hoc. Setelah itu, baru pada tahun 2007 lahirlah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari kerangka regulasi ini diturunkan beberapa regulasi turunan yang mengatur beberapa kebijakan secara operasional baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan regulasi lainnya. Kerangka regulasi tersebut merupakan referensi dan acuan utama penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan adanya regulasi itu maka sudah ada kebijakan secara nasional dan pembentukan badan khusus penanggulangan bencana yang bersifat permanen. Namun demikian, masih diperlukan kerangka regulasi lainnya yang merupakan turunan dari UU No. 24 Tahun 2007. Di luar itu masih ada beberapa persoalan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Beberapa persoalan itu antara lain; pembentukan kebijakan dan badan penanggulangan bencana di daerah, koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia dan persoalan penguatan kapasitas terkait penanggulangan bencana.

Di samping adanya kebijakan penanggulangan bencana secara nasional, terdapat pula kebijakan-kebijakan spesifik lainnya, antara lain, penanganan virus flu burung, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan aids, keselamatan dan keamanan

transportasi, penghematan energi dan air, percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut, pemberantasan penambangan kayu secara illegal, dan langkah penanganan masalah Poso. Kebijakan-kebijakan spesifik yang disebutkan tadi kiranya dapat menjadi komplemen terhadap penanggulangan bencana lainnya di Indonesia.

**Kategori Tata Ruang.** Pada kerangka regulasi yang terkait dengan isu tata ruang, terdapat berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan yaitu mengenai wilayah Negara, penataan ruang, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, indikasi geografis, pengembangan wilayah Surabaya-Madura, dan penataan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Bila dinilai dari berbagai kerangka regulasi tersebut, maka sangat diperlukan sinkronisasi dan pengintegrasian dalam rangka penyusunan penataan ruang wilayah secara komprehensif mulai dari level nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Dengan adanya sinkronisasi dan pengintegrasian kebijakan tersebut maka dapat dihindari adanya tumpang tindih dan inkonsistensi dalam pengaturan kebijakan penataan ruang secara nasional. Kebijakan mengenai penataan ruang ini harus dapat pula disinkronisasikan dengan kebijakan penanggulangan bencana. Dalam konteks perencanaan, kebijakan penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang terintegrasi melalui pendekatan sektoral dan regional sangat penting untuk dilakukan.

**Kategori Perubahan Iklim.** Sedangkan pada kerangka regulasi yang terkait dengan perubahan iklim masih sangat minim. Terdapat dua kebijakan dalam isu perubahan kebijakan ini yaitu pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan masalah bahan-bahan yang merusak lapisan ozon.

Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari permasalahan perkembangan global yang memandang urgen dan signifikan dalam rangka merespon perubahan iklim yang terus terjadi. Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan ini diperlukan kerja sama yang sinergis dengan berbagai negara lainnya. Melalui kerja sama yang sinergis ini dapat diwujudkan tatanan dunia yang lebih teratur dan dapat terhindar berbagai ancaman alam yang terjadi.

Berikut ini pemetaan kerangka regulasi yang sudah diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu:

## A. KATEGORI KEMANUSIAAN

### KERANGKA

#### REGULASI

#### SUBSTANSI REGULASI

UU 40 Tahun 2008	Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
UU 21 Tahun 2007	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU 5 Tahun 2006	Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
UU 6 Tahun 2006	Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
UU 13 Tahun 2006	Perlindungan Saksi Dan Korban
UU 20 Tahun 2006	Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya)
UU 11 Tahun 2005	Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
UU 12 Tahun 2005	Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
PP 9 Tahun 2008	Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
PP 44 Tahun 2008	Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
PP 4 Tahun 2006	Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perpres 13 Tahun 2007	Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Perpres 65 Tahun 2005	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Perpres 66 Tahun	Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional

2005	Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Keppres 7 Tahun 2007	Pembentukan Panitia Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Keppres 6 Tahun 2005	Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Keppres 7 Tahun 2005	Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Keppres 12 Tahun 2005	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
INPRES 6 Tahun 2006	Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

## B. KATEGORI BENCANA

<b>KERANGKA REGULASI</b>	<b>SUBSTANSI REGULASI</b>
UU 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana
UU 48 Tahun 2007	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
PERPU 2 Tahun 2007	Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
PERPU 2 Tahun 2005	Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
PP 21 Tahun 2008	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
PP 22 Tahun 2008	Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
PP 23 Tahun 2008	Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
PP 32 Tahun 2007	Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
PP 36 Tahun 2006	Pencarian Dan Pertolongan

Perpres 8 Tahun 2008	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Perpres 13 Tahun 2008	Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Perpres 32 Tahun 2008	Pengesahan Asean Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan Asean Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat)
Perpres 47 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Perpres 48 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Perpres 3 Tahun 2007	Perubahan Atas Perpres No.83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
Perpres 14 Tahun 2007	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Perpres 67 Tahun 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
Perpres 7 Tahun 2006	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
Perpres 61 Tahun 2006	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
Perpres 75 Tahun 2006	Komisi Penanggulangan Aids Nasional
Perpres 76 Tahun 2006	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Perpres 30 Tahun 2005	Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Perpres 34 Tahun 2005	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Perpres 54 Tahun 2005	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Keppres 3 Tahun 2007	Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Keppres 5 Tahun	Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan

2007	Semburan Lumpur Di Sidoarjo
Keppres 16 Tahun 2007	Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Keppres 9 Tahun 2006	Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY
Keppres 13 Tahun 2006	Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
Keppres 1 Tahun 2005	Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara Asean, Negara-Negara Lain, Dan Organisasi - Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami
Keppres 21 Tahun 2005	Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
INPRES 2 Tahun 2008	Penghematan Energi Dan Air
INPRES 1 Tahun 2007	Penanganan Dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)
INPRES 2 Tahun 2007	Percepatan Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
INPRES 1 Tahun 2005	Kegiatan Tanggap Darurat Dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara
INPRES 4 Tahun 2005	Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
INPRES 14 Tahun 2005	Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso

## C. KATEGORI TATA RUANG

### KERANGKA REGULASI

### SUBSTANSI REGULASI

UU 43 Tahun 2008	Wilayah Negara
UU 18 Tahun 2007	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003)
UU 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
UU 27 Tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
PP 26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
PP 37 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
Perpres 27 Tahun 2008	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
Perpres 54 Tahun 2008	Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

## D. KATEGORI PERUBAHAN IKLIM

### KERANGKA REGULASI

### SUBSTANSI REGULASI

Perpres 46 Tahun 2008	Dewan Nasional Perubahan Iklim
Perpres 33 Tahun 2005	Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
Perpres 46 Tahun 2005	Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
Keppres 13 Tahun 2007	Panitia Nasional Penyelenggaraan Dan Delegasi Republik Indonesia Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perubahan Iklim

# **Indonesia Humanitarian Report 2008**



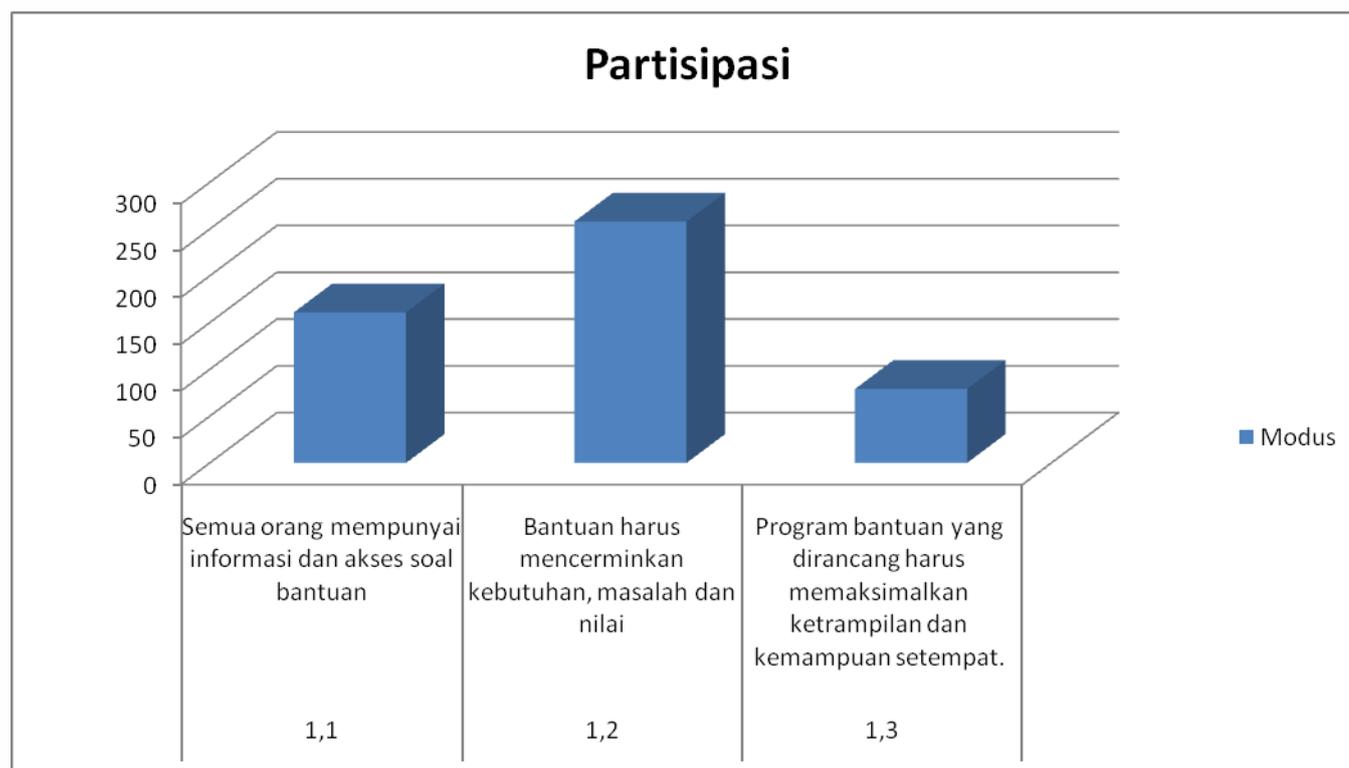
## **BAB V**

### **PENJELASAN MASING – MASING INDIKATOR SPHERE, CLUSTER DAN HUBUNGAN ANTARA KEDUANYA**

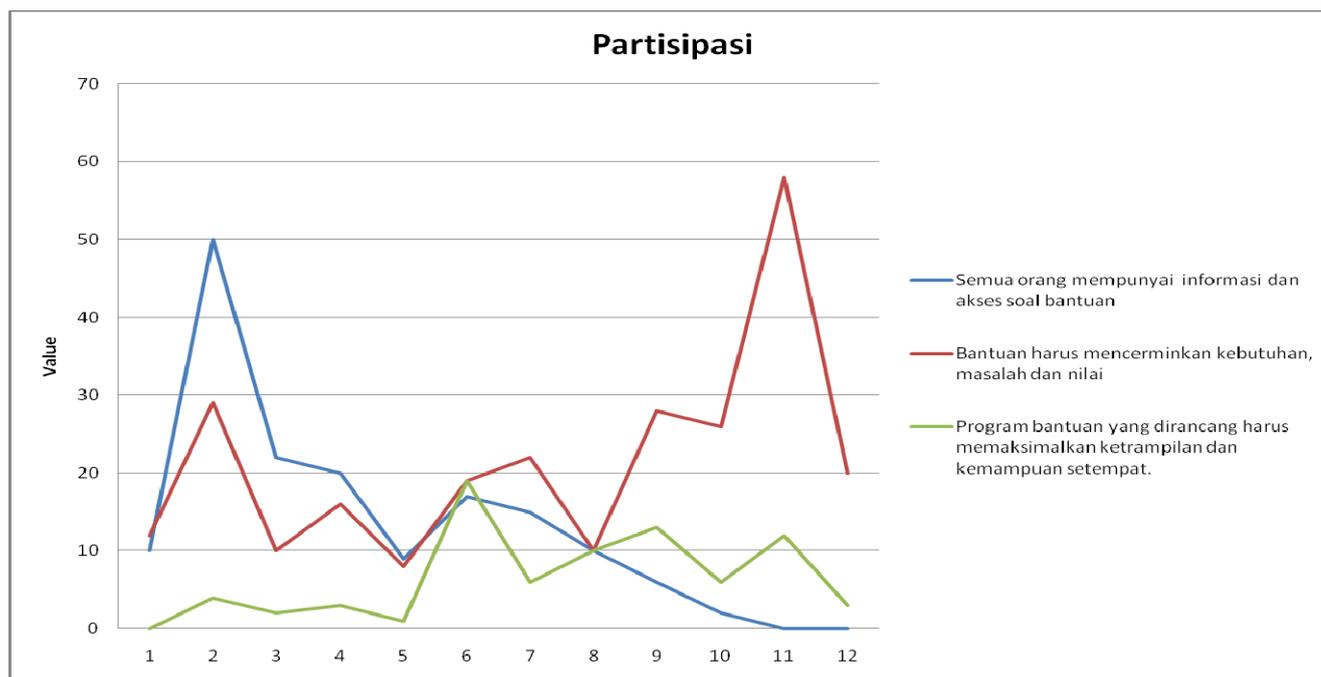
## V. Penjelasan masing – masing Indikator Sphere, Cluster dan hubungan antara keduanya

### 5.1. Penjelasan masing-masing Indiktor Sphere

#### 5.1.1. Partisipasi



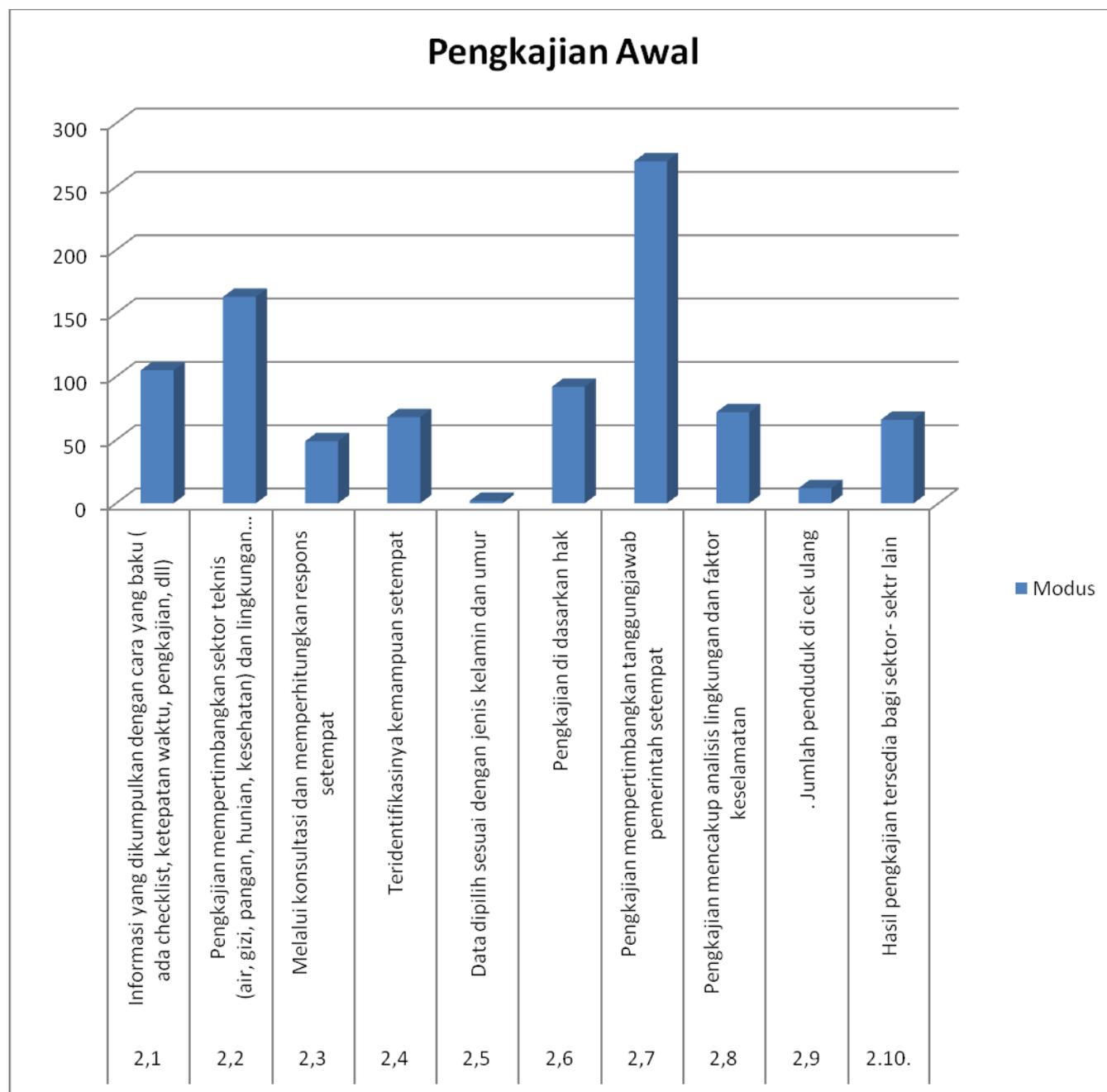
**Analisis** : Indikator Partisipasi pada Sphere menunjukkan bahwa partisipasi telah dilaksanakan dalam respon bencana, dimana porsi *sub indikator bantuan harus mencerminkan kebutuhan, masalah dan nilai paling banyak dilakukan*, hal ini diikuti pada sub indikator pertama yaitu semua orang mempunyai informasi dan akses soal bantuan, sedangkan program bantuan yang dirancang harus memaksimalkan ketrampilan dan kemampuan setempat mempunyai nilai yang paling rendah. Pada konteks respon, maka bantuan yang paling pertama di butuhkan adalah penyelamatan jiwa yang kemudian diikuti dengan urusan pemenuhan kebutuhan seperti makanan, air, obat - obatan dan kemudian di ikuti oleh proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk akses bantuan, dimana setiap orang mempunyai akses – menempati rangking kedua, hal ini menunjukkan bahwa respon bencana di Indonesia telah bersikap ‘open’ kepada public, hal ini akan membantu pelaksanaan respon bencana lebih baik. Rangking yang paling kecil adalah soal program bantuan yang dirancang harus memaksimalkan kemampuan setempat. Hal ini harus menjadi perhatian karena tanpa melibatkan masyarakat lokal, maka program respon tidak akan mempunyai nilai keberlanjutan di daerah tersebut.



Pada grafik tersebut menunjukkan adanya trend yang fluktuatif dimana pada sub indikator pertama, yaitu semua orang mempunyai akses informasi dan akses soal bantuan, di bulan januari – februari mempunyai nilai tertinggi dan hal ini terus merosot sampai bulan Desember. Padahal bencana per bulan sifatnya konstan, namun jumlah tertinggi ada pada awal bulan yakni Januari – Februari, November dan Desember. Hal ini berbanding berbalik pada bantuan harus mencerminkan kebutuhan, masalah dan nilai, karena di awal bulan mempunyai nilai tidak tinggi namun mengalami peningkatan yang drastis pada bulan September, Oktober dan November. Sedangkan pada sub indikator program bantuan yang harus mencerminkan bantuan yang dirancang harus memaksimalkan ketrampilan dan kemampuan setempat menunjukkan nilai stabil terus namun berada pada nilai yang rendah.

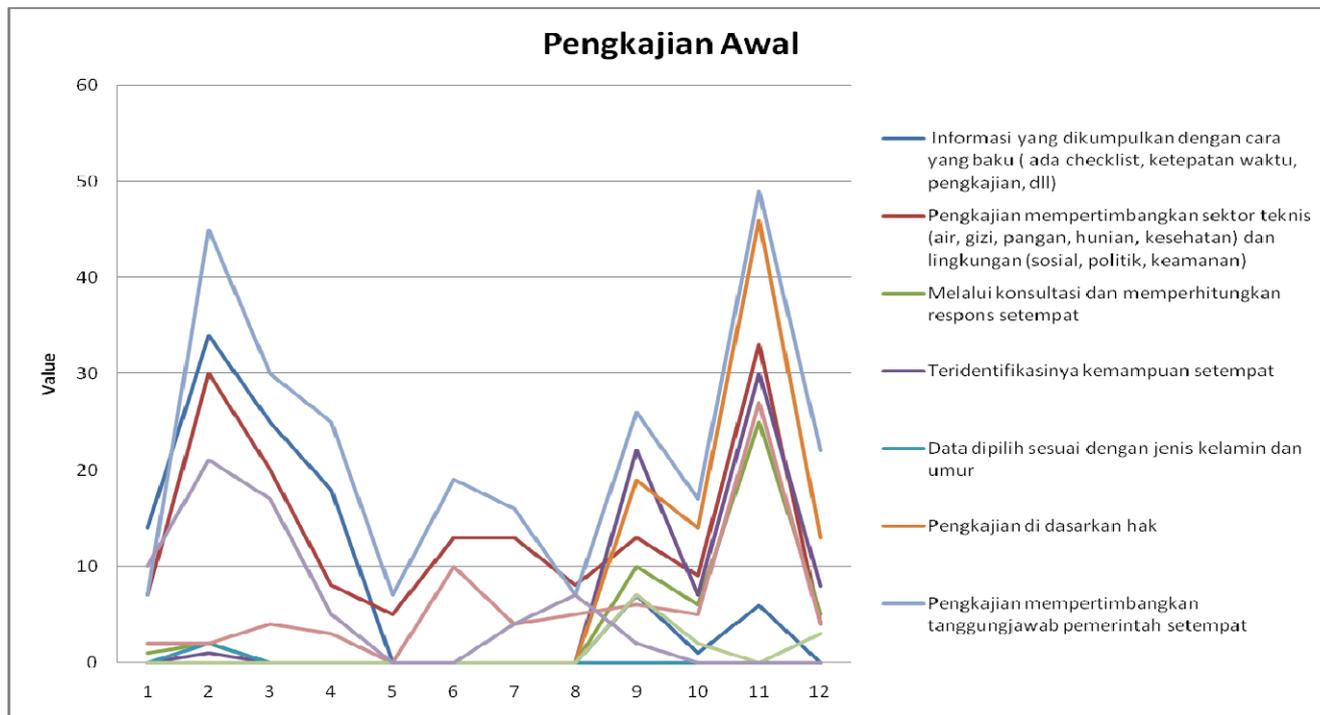
**Rekomendasi** : Pentingnya melibatkan masyarakat lokal lebih baik lagi termasuk di dalamnya dalam mengadopsi apa yang menjadi kemampuan dan ketrampilan masyarakat setempat.

## 5.1.2. Pengkajian Awal



**Analisis** : Pada pengkajian awal, terdiri dari 10 indikator. Dari data yang terlihat pada grafik di atas, nilai tertinggi ada pada sub indikator ke tujuh yaitu pengkajian mempertimbangkan tanggungjawab pemerintah setempat, kemudian diikuti dengan sub indikator pengkajian mempertimbangkan sektor teknis (air, gizi, pangan dan hunian), informasi yang dikumpulkan dengan cara baku (ada ckecklist, dst), pengkajian yang didasarkan hak serta teridentifikasinya kemampuan setempat dan pengkajian mencakup analisis lingkungan dan faktor keselamatan. Sementara nilai terendah ada pada

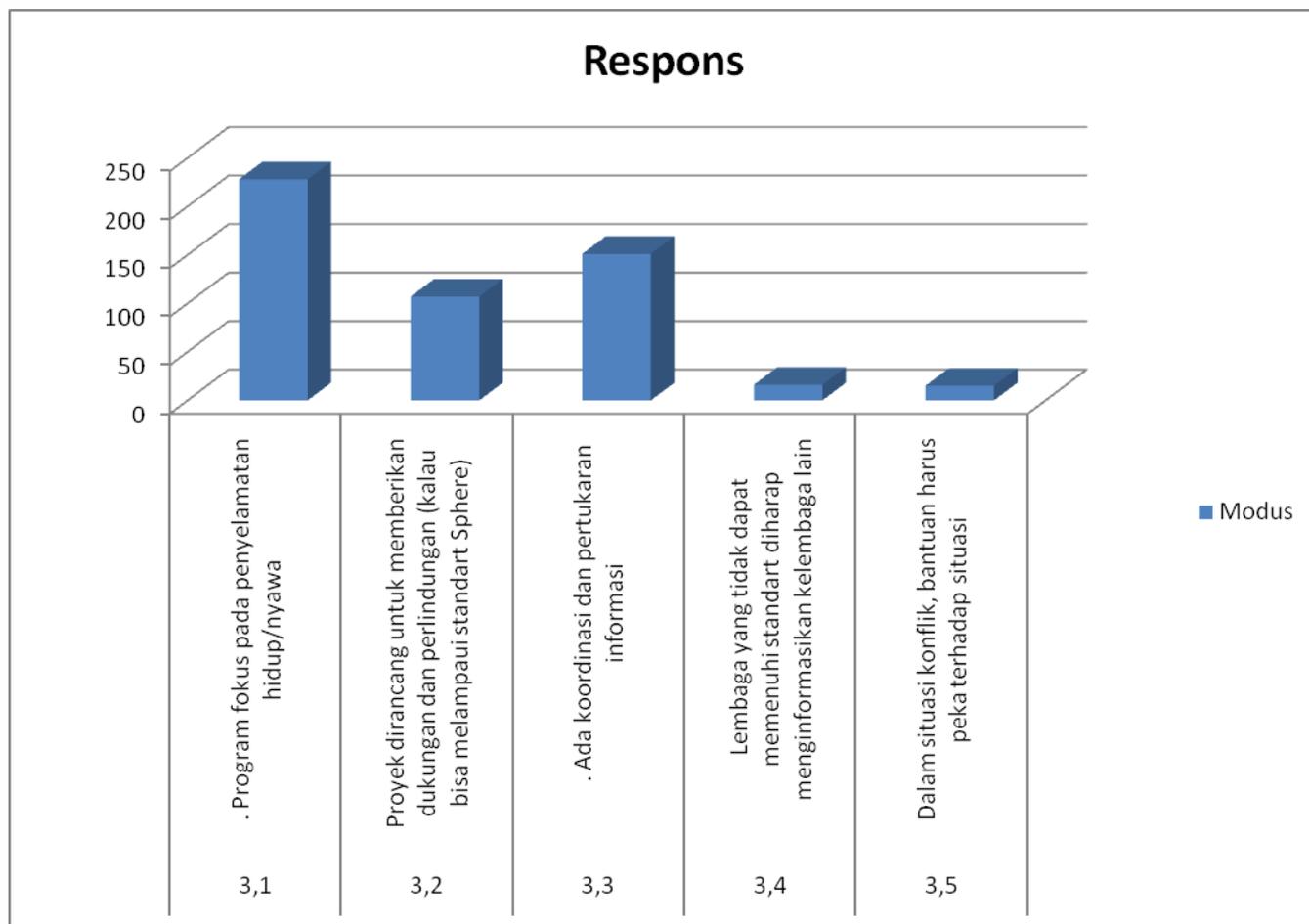
pendataan yang diklasifikasikan berdasarkan dengan jenis kelamin dan umur serta jumlah penduduk yang di cek pada saat sebelum bencana dan setelah bencana.



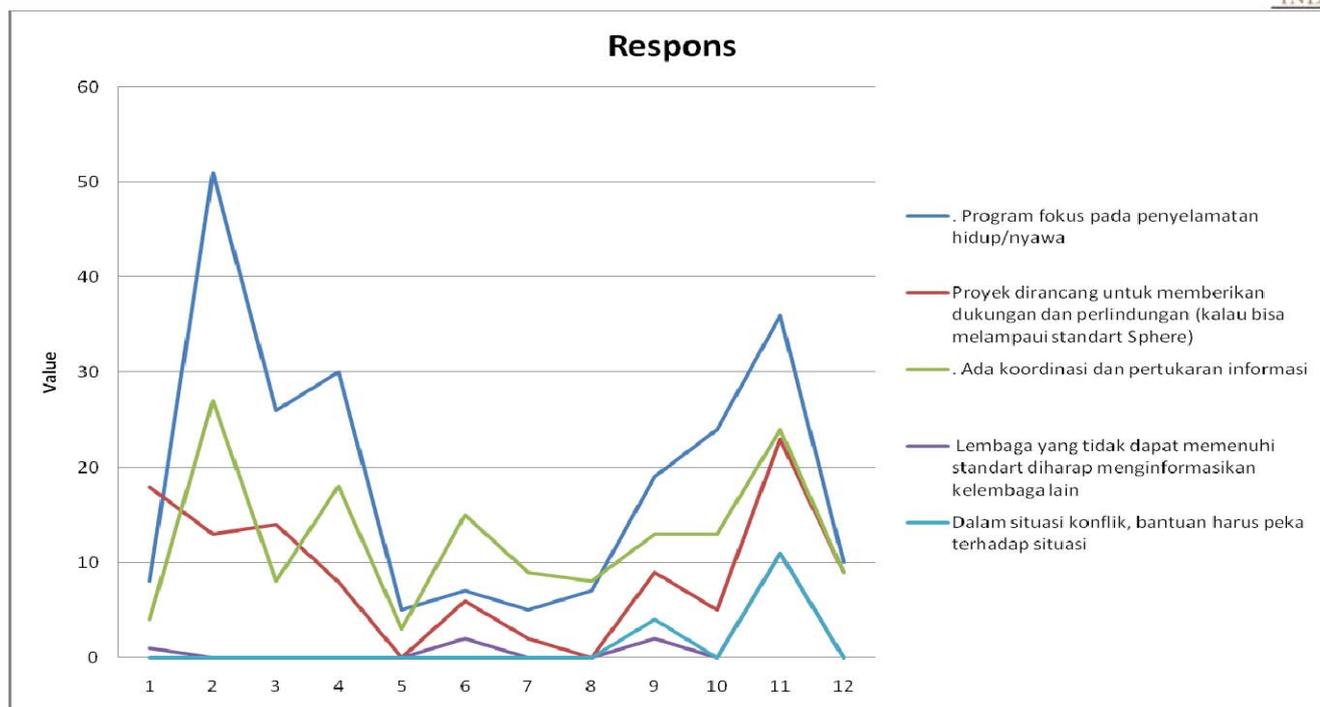
Analisa : Grafik diatas semakin memperjelas analisis sebelumnya. Grafik ini menunjukkan trend gerakan yang hampir sama, dimana nilainya selalu mengalami kenaikan yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan Februari dan mulai turun pada bulan Maret hingga sampai titik terendah pada bulan Mei 2008. Pada bulan Mei, jumlah bencana tidak banyak sehingga respon bencana juga tidak banyak. Yang menarik adalah pengkajian yang didasarkan hak nilainya sangat rendah pada seluruh bulan. Hal ini menunjukkan bahwa respon bencana masih dilihat sebagai 'bantuan semata' bukan sebagai tindakan yang didasarkan sebagai sebuah implementasi dari pelaksanaan hak. Padahal bila dikaitkan dengan UU No. 2004 tahun 2007 pemberian bantuan ini harus dilihat sebagai bentuk pemberian 'rasa aman dan terlindungi' karena hal ini merupakan hak asasi. '

**Rekomendasi:** Pentingnya sosialisasi substansi UU No. 24/2007 tentang PB yang memuat tentang rasa aman dan terlindungi sebagai hak asasi.

5.1. 3. Respons



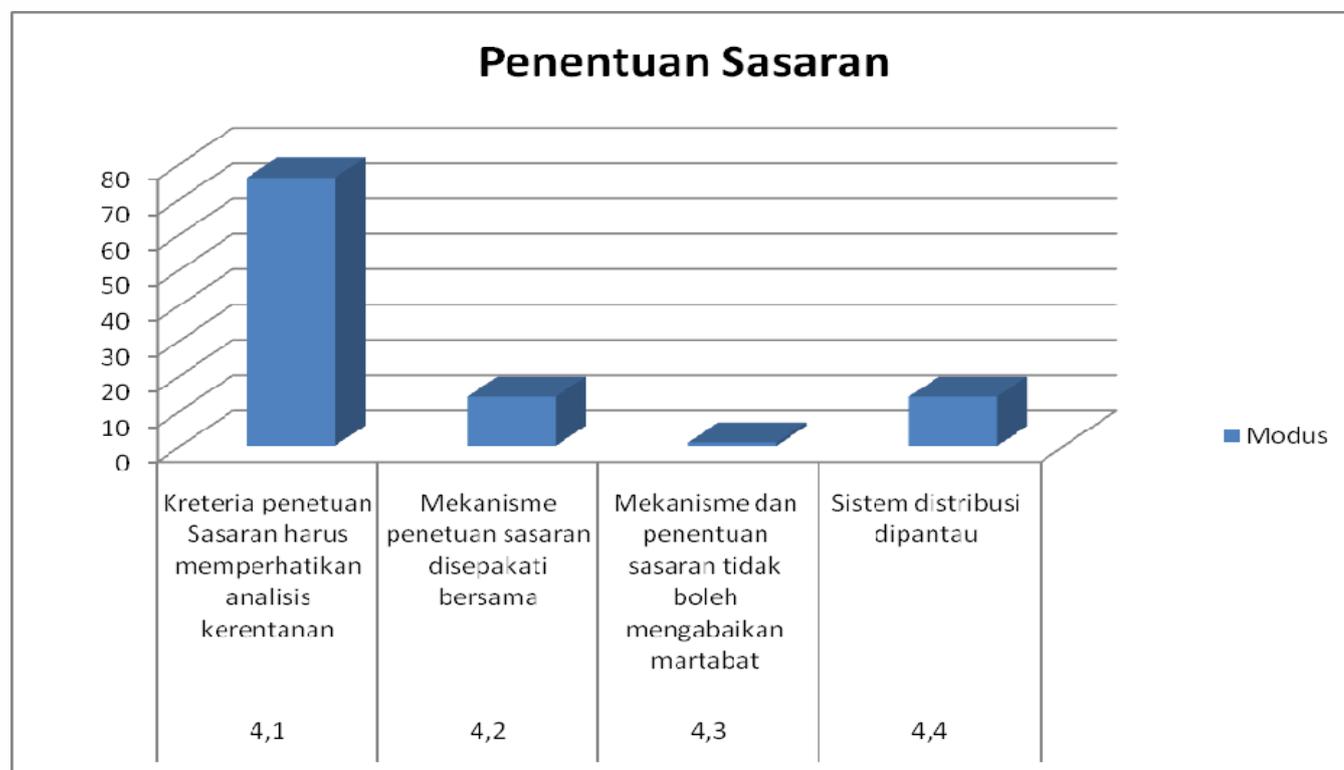
**Analisis** : Pada indikator respon, nilai tertinggi ada pada sub indikator program fokus penyelamatan hidup atau nyawa. Berturut-turut kemudian diikuti oleh ada koordinasi dan pertukaran informasi, proyek dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan. Sedangkan lembaga yang tidak dapat memenuhi standard diharapkan menginformasikan kelembaga lain dan dalam situasi konflik bantuan harus peka terhadap situasi mempunyai nilai paling rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa respons bencana, semua pihak menyadari bahwa adalah penyelamatan korban. Sayang sekali hal ini tidak di dukung dengan pemahaman dalam merespon konflik. Meskipun di sadari bahwa konflik adalah merupakan penyebab bencana yang sangat spesifik, namun respons bencana dalam konteks konflik harus tetap menjadi perhatian. Selama ini penanganan respons konflik masih banyak dilakukan oleh TNI, Departemen Sosial dan tokoh agama, sedangkan NGO dan INGO yang bergerak dalam bidang ini belum banyak.



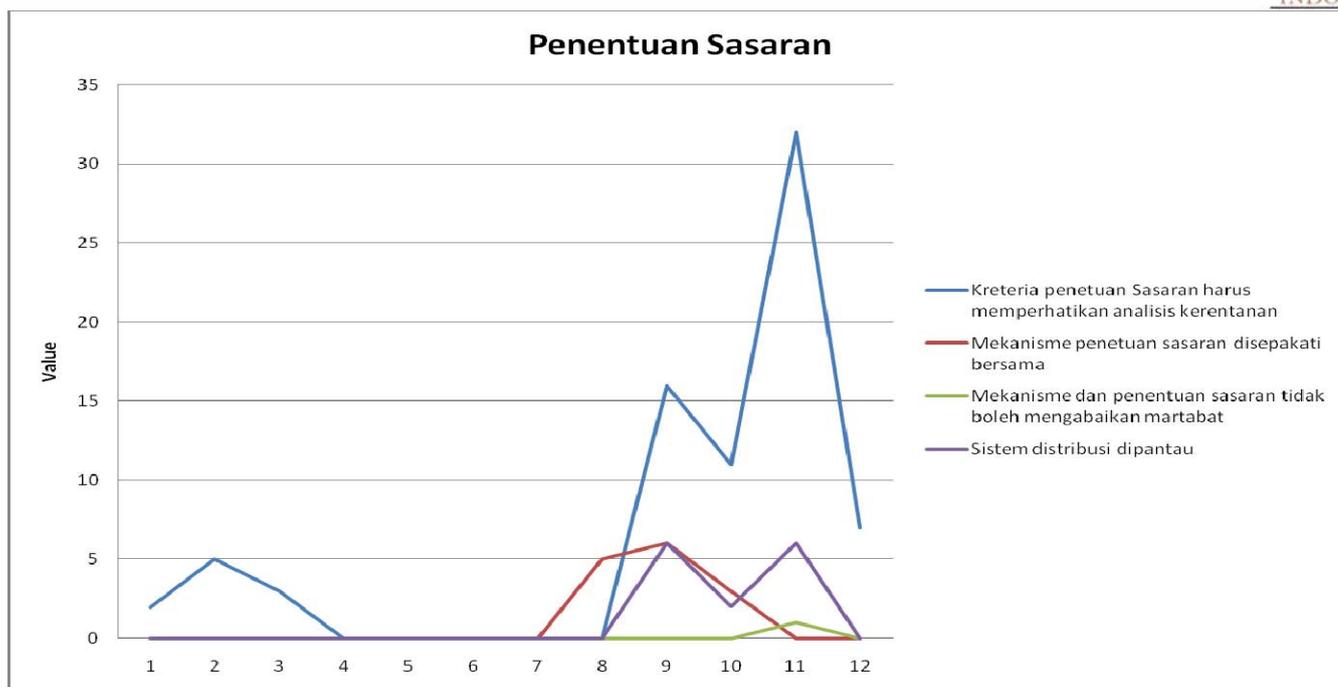
Pada grafik di atas terlihat bahwa program yang fokus pada penyelamatan hidup/nyawa adalah porsi tertinggi . Dan seperti analisis lainnya pada bulan Februari mengalami kenaikan paling tinggi dan mulai turun pada bulan Maret 2008. Sedangkan pada bulan Mei dan Juli merupakan nilai terendah pada beberapa titik. Hal ini bisa dilihat pada data dasar bahwa pada jumlah bencana tidak banyak namun demikian jumlahnya akan naik pada bulan Agustus dan turun lagi pada bulan Desember. Sedangkan pada sub indikator kedua yang menunjukkan gambaran proyek yang dirancang untk memberikan dukungan dan perlindungan serta adanya koordinasi dan pertukaran informasi juga dilaksanakan meski prosentasenya masih sangat sedikit.

**Rekomendasi:** Pentingnya pemahaman bahwa definisi bencana tidak hanya fokus pada bencana alam namun juga bencana sosial dan konflik, sehingga perhatian untuk konflik harus sama besarnya dengan bencana alam.

## 5.1.4. Penentuan Sasaran



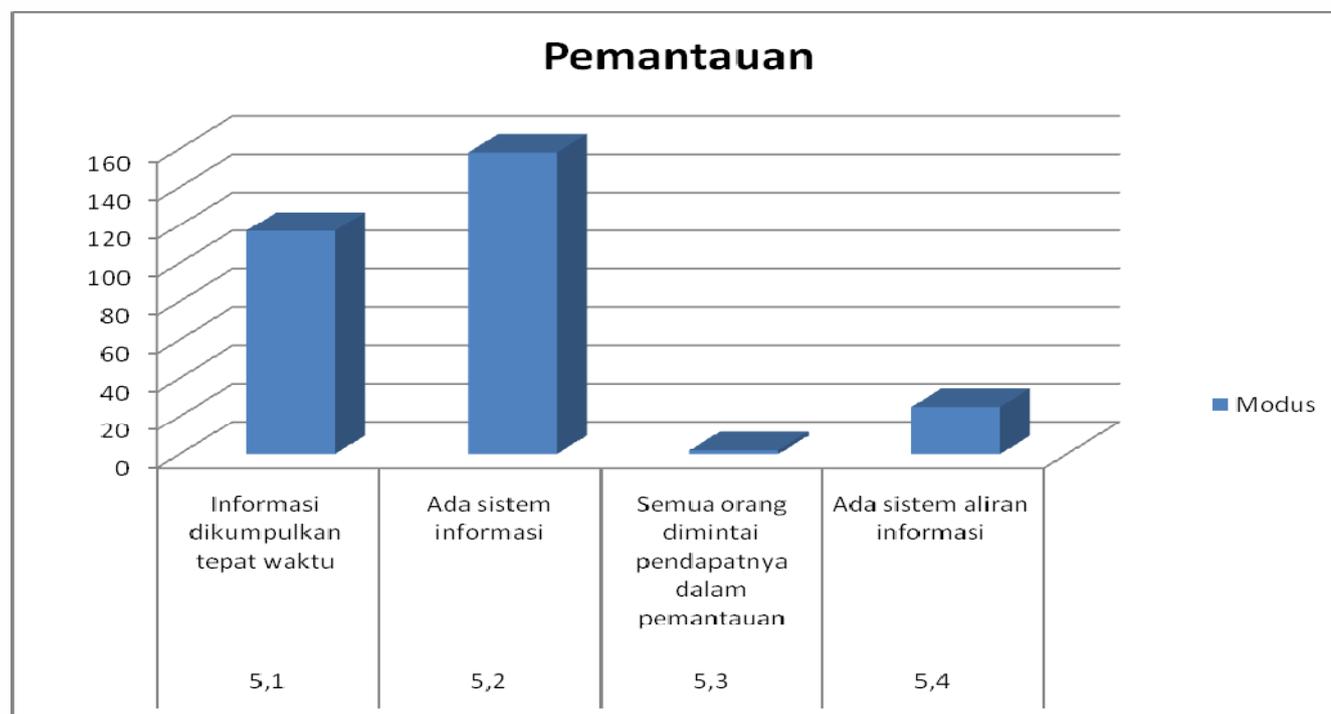
Dalam indikator penentuan sasaran, kriteria penentuan sasaran harus memperhatikan analisis kerentanan mempunyai nilai tertinggi hal ini diikuti dengan mekanisme penentuan sasaran disepakati bersama dan sistem distribusi dipantau. Sedangkan pada mekanisma penentuan sasaran tidak boleh mengabaikan martabat, mempunyai nilai terendah. Ada *anomali* disini, karena dalam menentukan sasaran sudah memperhatikan faktor kerentanan, baik kerentanan seperti kondisi sosial, kemiskinan maupun pendidikan namun pada mekanisme dan penentuan sasaran tidak boleh mengabaikan martabat, nilainya sangat rendah. Bisa jadi hal ini belum dipahaminya soal apa yang sesungguhnya mengabaikan martabat dan apa yang menyebabkan sebuah bantuan tidak memartabatkan masyarakat. Sementara nilai yang hampir sama ada pada dua indikator yaitu soal pemantauan dan kesepatan bersama dalam penentuan sasaran, hal ini menunjukkan ada kesadaran untuk melakukan kedua hal ini meskipun masih rendah.



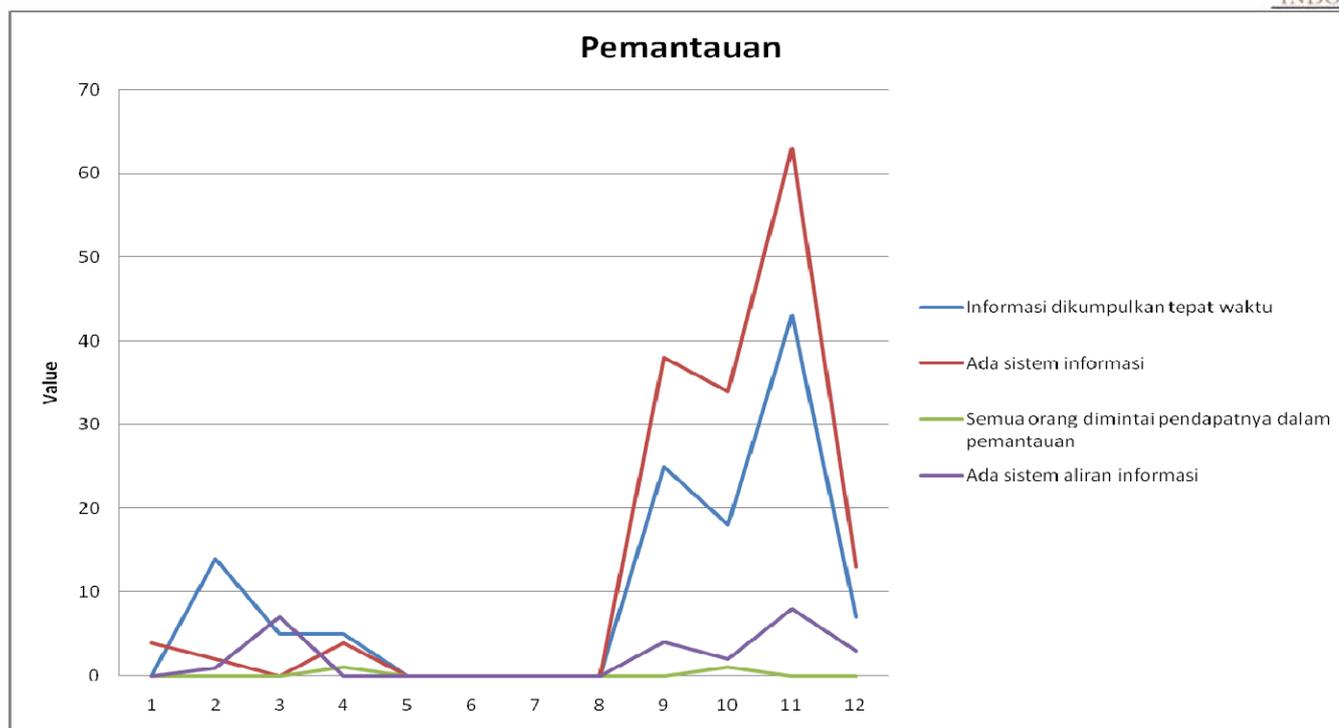
Pada grafik penentuan sasaran menggambarkan bahwa diawal-awal bulan (Januari sampai Maret) hanya sub indikator penentuan sasaran harus memperhatikan kerentanan, itupun mengalami nilai yang terus turun pada bulan April s/d Juli 2008 dan kemudian naik terus hingga mempunyai nilai tertinggi pada bulan November 2008. Sedangkan pada sub indikator mekanisme yang harus disepakati bersama serta sistem distribusi menggambarkan adanya kegiatan tersebut meskipun rendah. Sedangkan trend grafik hampir sama dengan yang lainnya, diawal bulan tinggi kemudian rendah dan naik kembali pada akhir tahun. Yang paling rendah digambarkan pada mekanisme penentuan sasaran tidak boleh mengabaikan martabat.

**Rekomendasi :** Pentingnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pemahaman soal kemanusiaan baik terkait dengan piagam kemanusiaan, Sphere dan UU No. 24 Tahun 2007.

## 5.1.5. Pemantauan



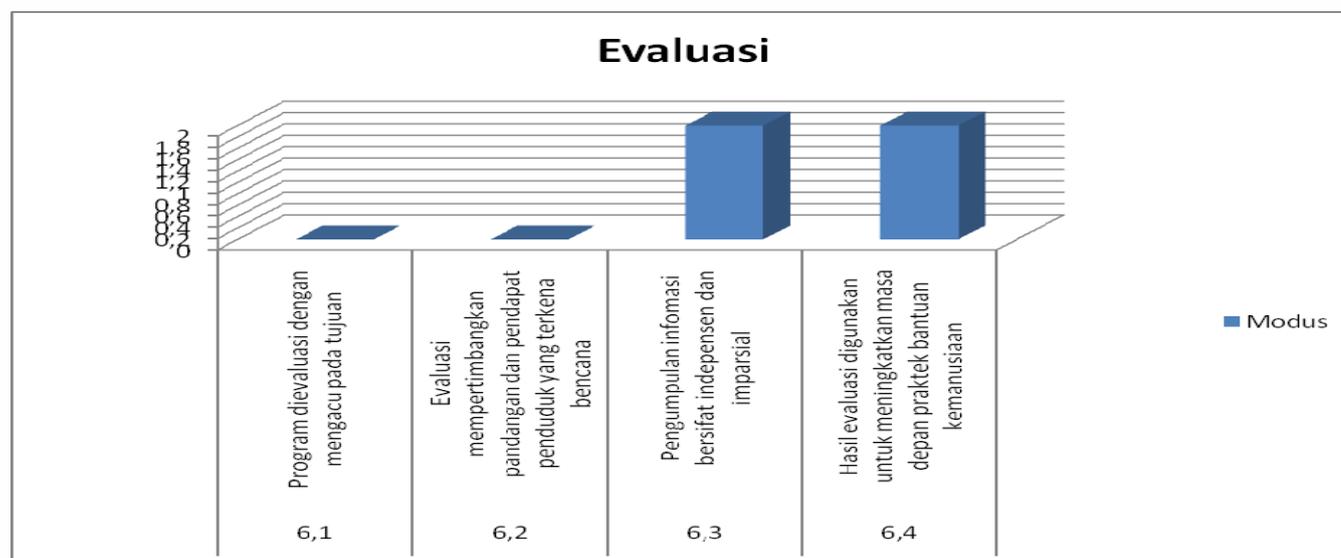
**Analisa** : Dalam indikator pemantauan menggambarkan bahwa ada sistem informasi yang baik dan informasi atau laporan kegiatan respon banyak yang dikumpulkan tepat waktu. Sedangkan pada aliran informasi dilakukan meskipun nilainya rendah dan yang paling rendah adalah semua orang dimintai pendapatnya dalam pemantauan padahal seharusnya semua pihak baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dari semua kelompok yang terkena bencana harus secara rutin dimintai pandangan dan dilibatkan dalam kegiatan pemantauan. Bila demikian adanya gambaran tersebut menunjukkan bahwa pemantauan yang dilakukan hanya untuk pemantauan proyek, dimana penekanan pemantauan yang seharusnya demi akuntabilitas dan kualitas kerja di masyarakat justru nilainya sangat rendah.



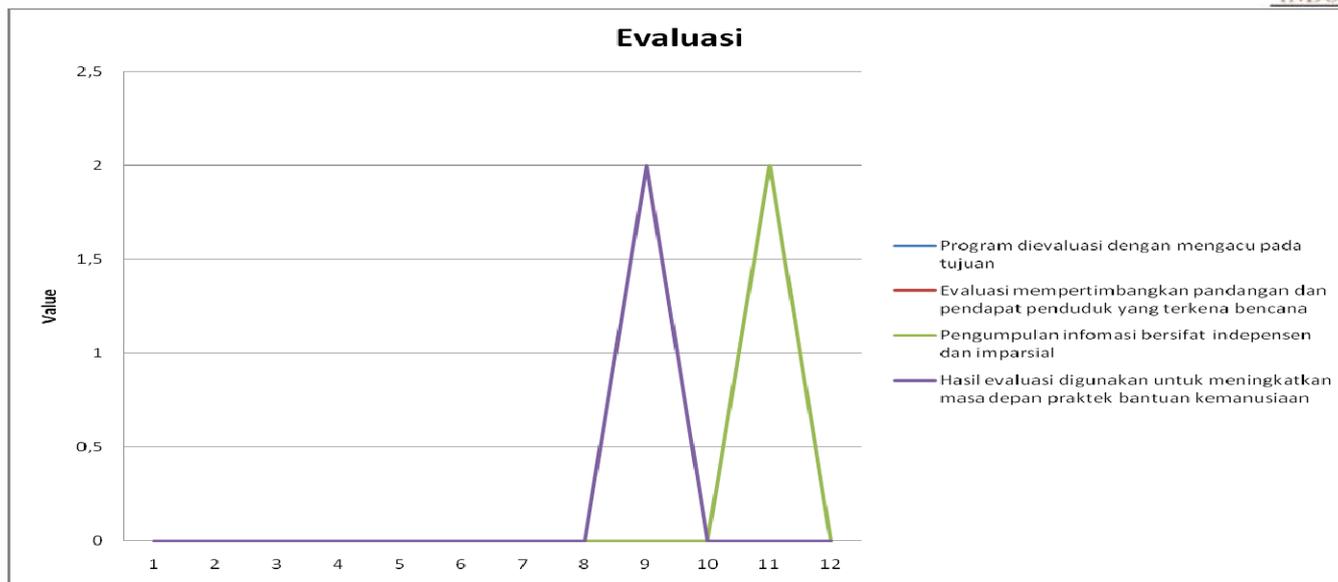
Pada grafik yang terpapar menggambarkan bahwa bulan Agustus s/d Desember adalah masa dimana nilai tertinggi dari pelaksanaan tiga sub indikator dilaksanakan, yaitu sub indikator informasi dikumpulkan tepat waktu, ada sistem informasi dan adanya sistem aliran informasi. Dan sebagaimana grafik lainnya pada bulan Mei s/d Agustus nilainya rendah, karena jumlah bencananya juga rendah. Semua sub indikator tersebut seharusnya digunakan dalam rangka melihat efektifitas program sehingga bisa berdampak luas dan terus dipantau sehingga kemanfaatan dan keberlangsungannya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

**Rekomendasi** : Lebih terbuka kepada semua pihak yang menjadi perhatian dari respon, sehingga siapapun mereka bisa terlibat baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak bisa mengakomodasikan pendapatnya dalam pemantauan, karena hal ini merupakan sebuah 'keharusan' dari kualitas respons dan akuntabilitas.

### 5.1.6. Evaluasi



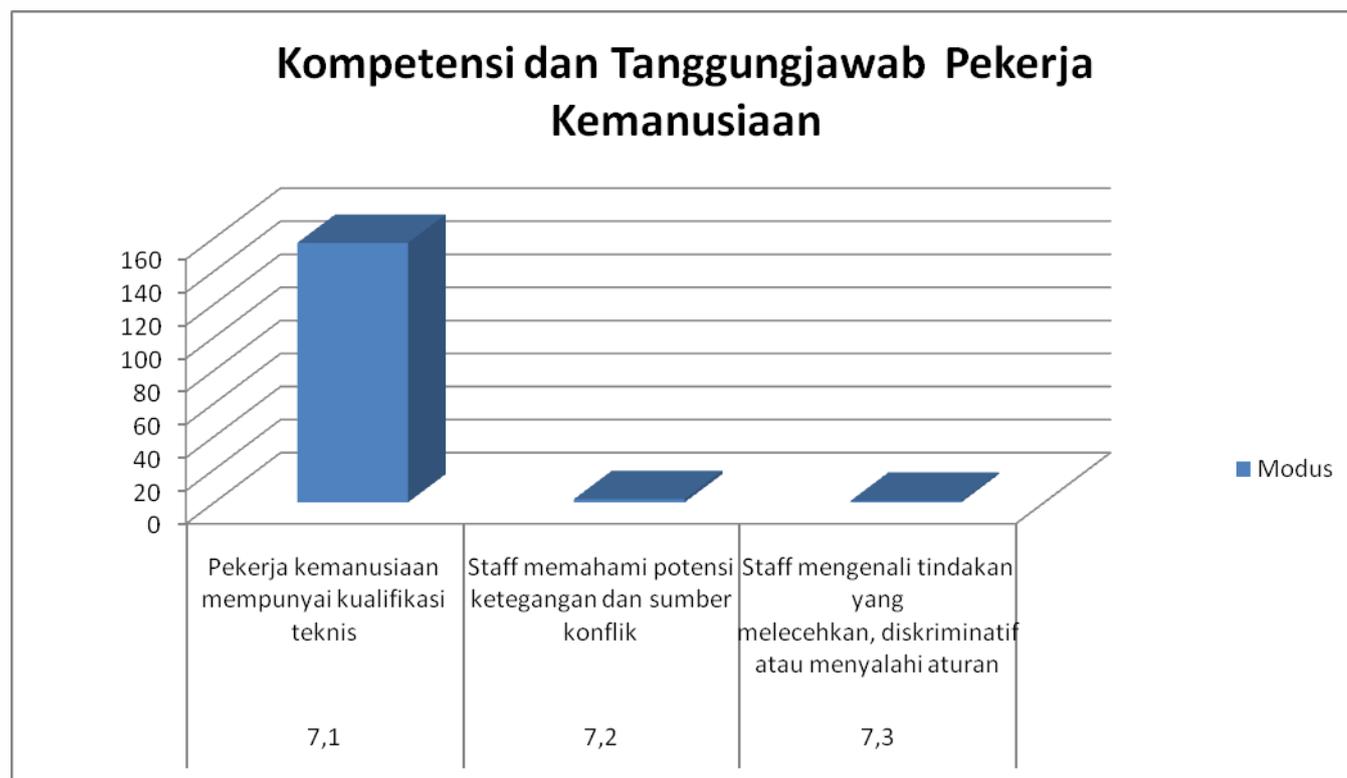
Analisa : Pada grafik di atas memperlihatkan bahwa untuk Indikator evaluasi memperlihatkan adanya nilai tertinggi pada pengumpulan informasi bersifat independen dan imparial yang merupakan sub indikator ketiga serta hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan masa depan praktek bantuan kemanusiaan yang merupakan sub indikator keempat. Hal ini menggambarkan bahwa pada respon, data berhasil dikumpulkan dari berbagai pihak yang independen dan data tersebut dipergunakan untuk diambil pelajarannya di masa yang akan datang. Namun ternyata basis data yang dikumpulkan pada saat evaluasi tidak mengacu pada tujuan dari respon atau proyek yang dilaksanakan. Padahal dengan sub indikator pertama tersebut kita bisa melihat kepatutan, efektifitas dan keherensi dan dampaknya terhadap penduduk yang terkena dampak bencana. Hal ini juga tergambar pada sub indikator kedua, dimana nilainya sama rendahnya dengan yang pertama. Sub indikar ini sangat sedikit mempertimbangkan pandangan atau pendapat dari penduduk yang terkena bencana.



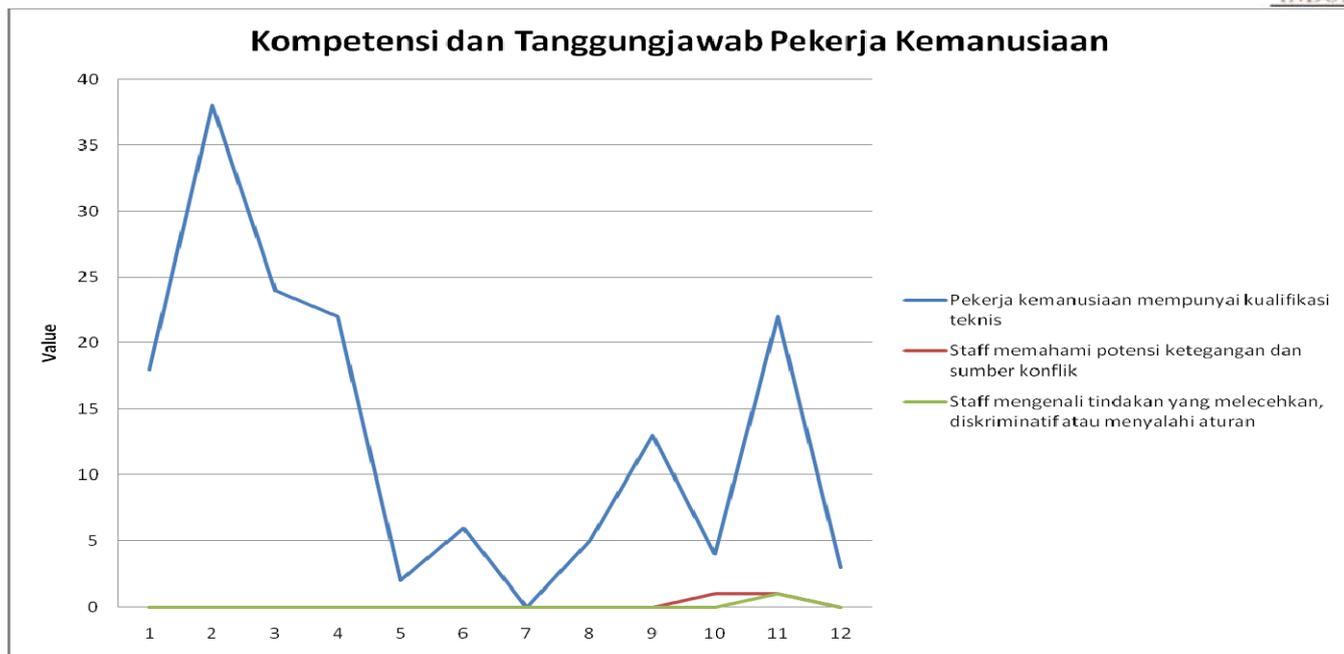
Grafik ini menggambarkan dengan jelas bahwa sub indikator program dievaluasi dengan mengacu pada tujuan dan evaluasi mempertimbangkan pandangan dan pendapat penduduk yang terkena bencana sangat rendah, sedangkan pada sub indikator ketiga dan keempat mengalami kenaikan mulai Agustus dan tercatat puncaknya pada bulan Oktober. Sedangkan untuk indikator keempat mulai mengalami kenaikan pada bulan Oktober dan mengalami puncaknya pada bulan November dan turun lagi di bulan Desember 2008. Proses ini sangat sulit karena respon bencana seringkali ditandai oleh perubahan – perubahan yang cepat dan seringkali adanya ketidakpastian, sehingga diperlukan alat yang bisa dipergunakan sekaligus diakui keabsahannya.

Rekomendasi : Adalah keharusan bagi siapapun yang melakukan kegiatan respon untuk melakukan evaluasi secara tertulis, karena hanya dengan evaluasi akan didapat pelajaran untuk masa yang akan datang serta menjamin adanya proses akuntabilitas.

## 5.1.7. KOMPETENSI dan Tanggungjawab Pekerja Kemanusiaan



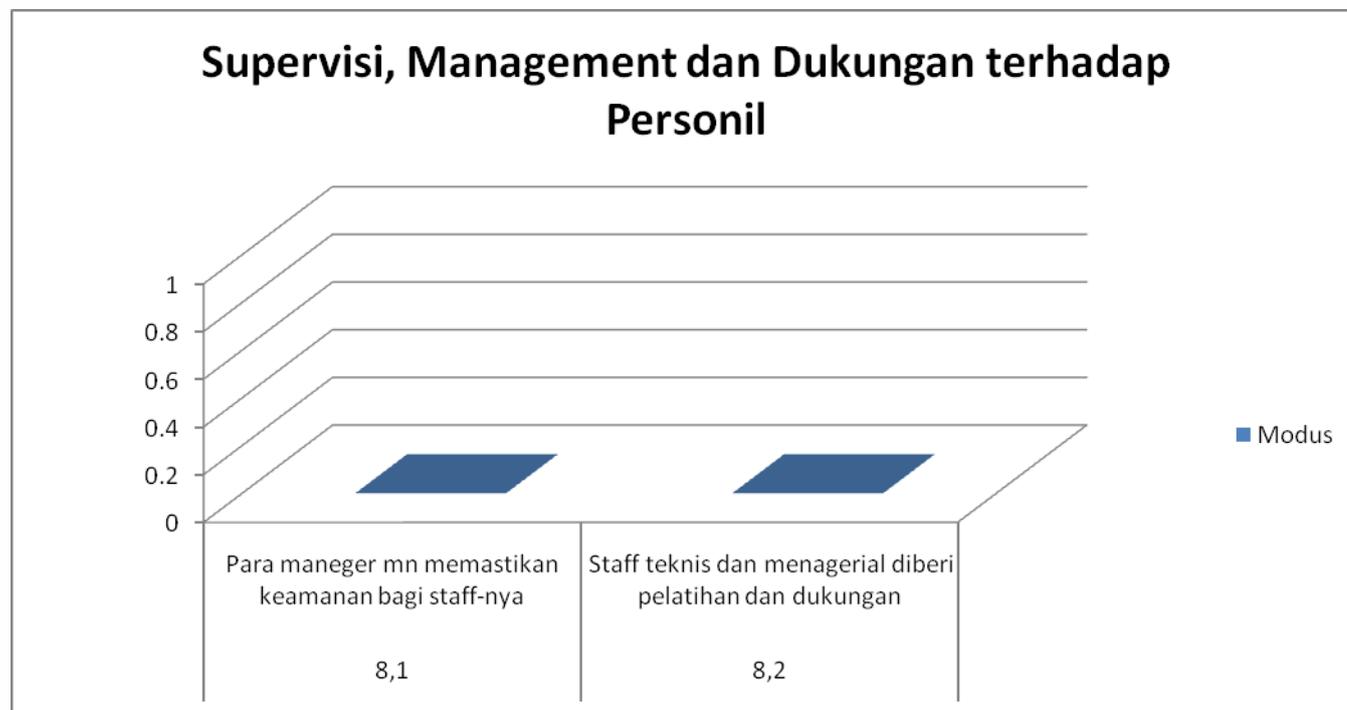
**Analisis** : Pada Indikator Kompetensi dan Tanggungjawab Pekerja Kemanusiaan mengandung tiga sub indikator yaitu pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi teknis, dimana hal ini tergambar paling tinggi nilainya. Sub indikator ini sangat penting karena mutlak diperlukan oleh seseorang yang akan ke lapangan pada saat respon, dan data menggambarkan bahwa bila tidak mempunyai kemampuan teknis terjun ke lapangan hanya akan menimbulkan masalah baru dalam respon. Sedangkan pada sub indikator dua dan tiga, dimana staf memahami potensi ketegangan dan sumber konflik serta sub indikator ketiga yaitu staf mengenali tindakan yang melecehkan diskriminasi atau menyalahi aturan mempunyai nilai yang sama – sama rendah. Kedua indikator ini menggambarkan bahwa pekerja lapangan banyak yang tidak mempunyai kemampuan analisa sosial. Ini menunjukkan bahwa bencana hanya dipahami sebagai respon dan belum dianggap sebagai suatu bagian dari ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari dan berhubungan dengan berbagai disiplin lainnya seperti konflik, kerentanan, sosial dan lainnya.



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa kualitas teknis mempunyai nilai tertinggi di awal tahun 2008 bahkan mengalami nilai tertinggi di bulan Februari, namun turun dan mencapai titik paling bawah pada bulan Juli. Meski demikian sub indikator ini terus mengalami kenaikan dan turun lagi pada bulan Desember 2008. Namun nilai rendah ada pada dua indikator lainnya. Hal ini menjadi gambaran yang memprihatinkan, dimana pada sub indikator dua yaitu staf memahami potensi ketegangan dan sumber konflik serta staf mengenali tindakan yang melecehkan, diskriminatif atau menyalahi aturan nilainya sangat rendah dan sedikit bergerak pada bulan Oktober dan Desember.

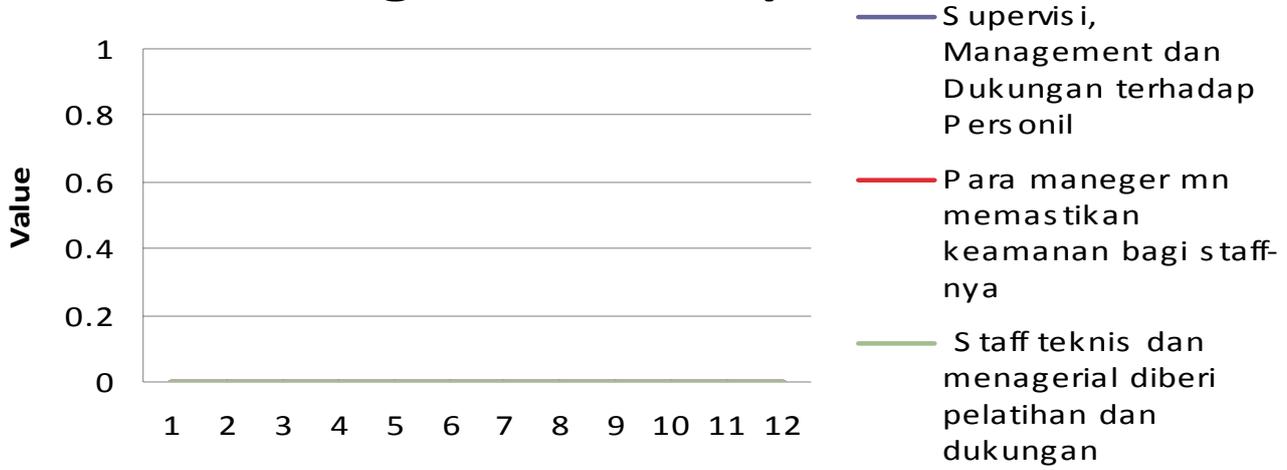
Rekomendasi : Pentingnya peningkatan pemahaman dan kapasitas bagi pekerja kemanusiaan soal potret dari kebijakan nasional dan lokal, kerentanan, sosial masyarakat dan HAM.

## 5.1.8. Supervisi, Managemement dan Dukungan terhadap Personil



Pada indikator ini sesungguhnya terdiri dari 8 sub indikator, namun pada sub indikator ke 4 sampai ke – 8 disederhanakan pada indikator ke tiga. Ketiga sub indikator tersebut adalah para manager memastikan keamanan bagi staf-nya, staf teknis managerial diberi pelatihan dan dukungan, mempunyai nilai yang sangat rendah. Matrik di atas menggambarkan bahwa soal asuransi, kenyamanan kerja serta supervisi tidak didapatkan. Hal ini juga berarti bahwa banyak pekerja kemanusiaan tidak menerima supervisi dan dukungan dalam melaksanakan tugasnya sehingga kegiatan dan bantuan kemanusiaan sering tidak berjalan dengan efektif.

## Supervisi, Management dan Dukungan terhadap Personil

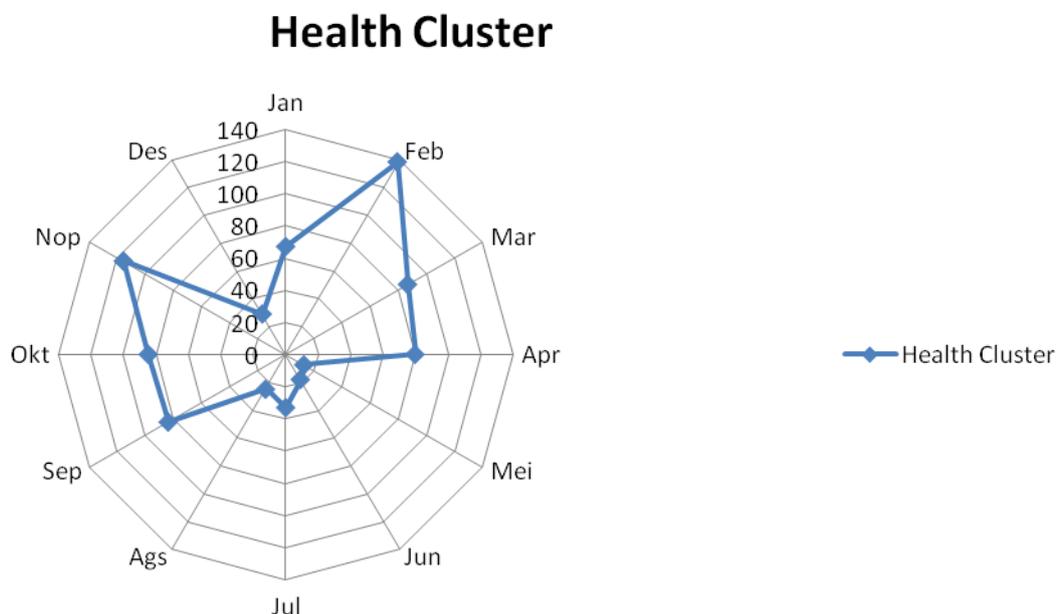


Pada grafik semakin memperlihatkan dengan nyata bahwa pada standard umum ke 8 ini tidak dilaksanakan dengan baik. Pada indikator ini merupakan urusan manajemen internal, seperti peningkatan kapasitas, auransi, SOP dan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja pekerja kemanusiaan.

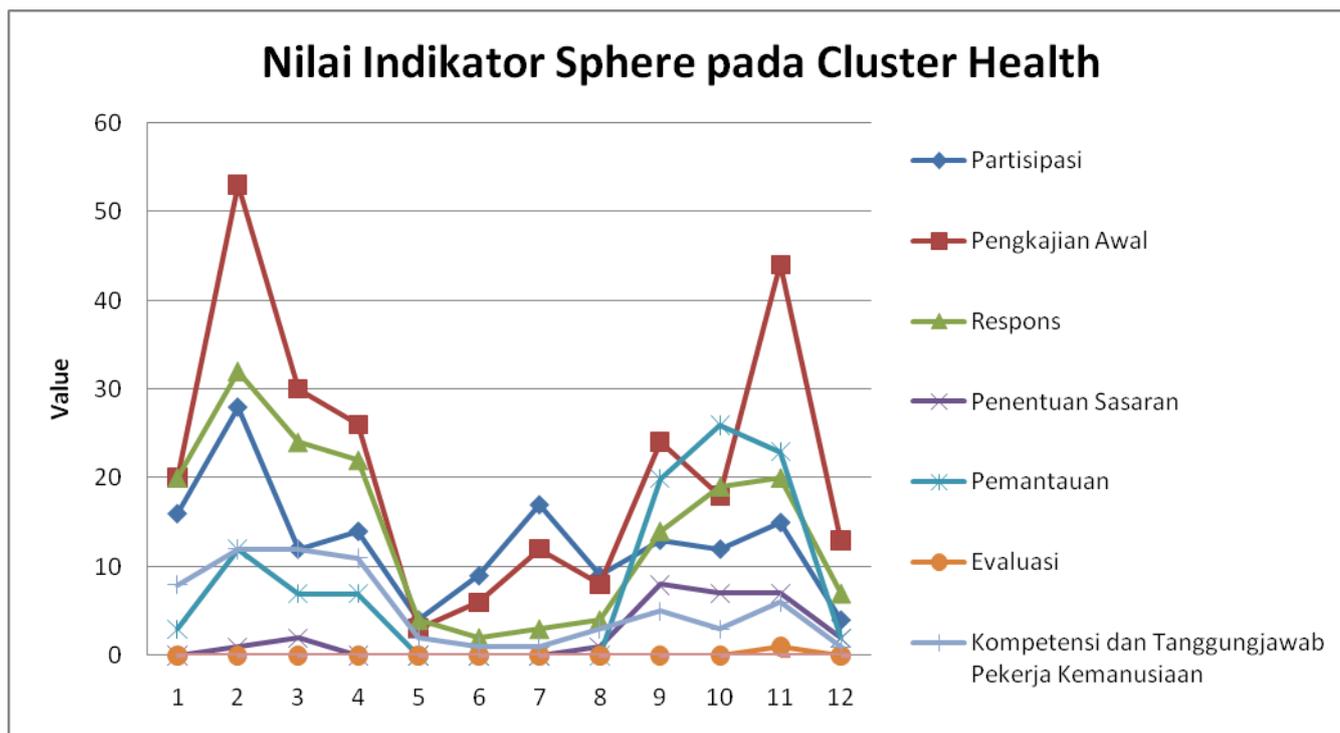
Rekomendasi : Urusan ini sama pentingnya dengan urusan di lapangan sehingga harus mendapatkan perhatian terutama soal manajemen dan asuransi sehingga pekerja lapangan mempunyai kualitas kerja yang baik.

### 5.2. Penilaian Kegiatan Respons berdasarkan Cluster

#### 5.2.1. Cluster Health/Kesehatan

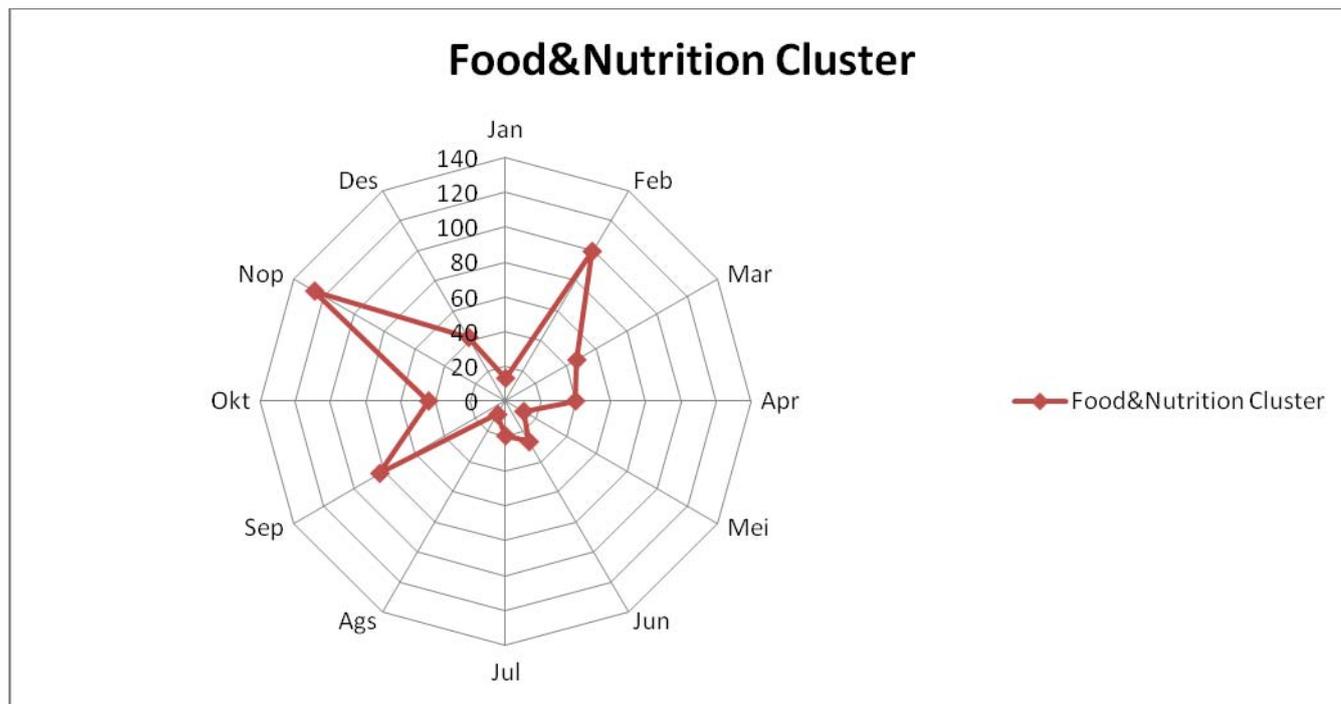


Pada lingkaran di atas menunjukkan bahwa kegiatan mulai naik di bulan Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Februari yang kemudian terus merosot pada bulan Maret dan mencapai titik rendah pada bulan Mei, Juni dan Juli 2008. Hal ini sama dengan analisis sebelumnya bahwa ada bulan – bulan tersebut kegiatan respon bencana tidak terlalu banyak dilakukan. Namun kemudian mulai bulan September sampai Nopember kembali mengalami kenaikan. Pada Cluster ini secara umum kegiatannya banyak dilakukan dan hampir seluruh bulan mulai Januari sampai dengan Desember menunjukkan kegiatan yang cukup aktif.

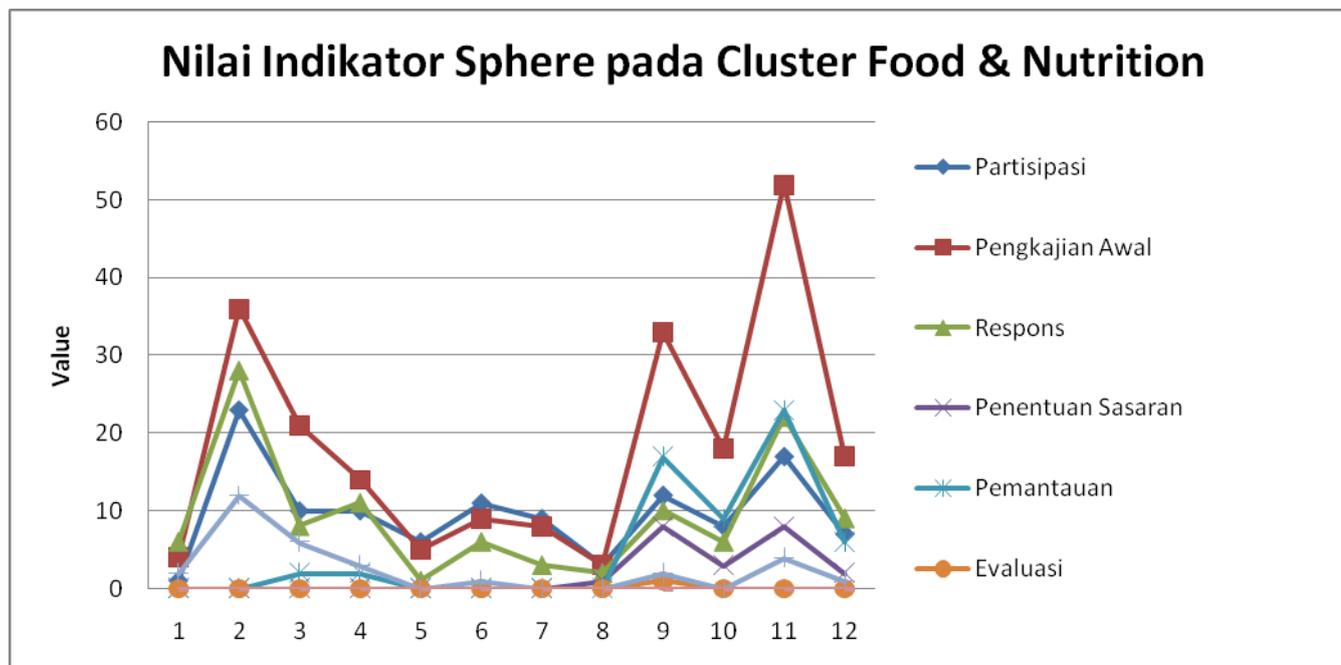


**Analisa :** Pada cluster Kesehatan menggambarkan bahwa soal pengkajian telah dilakukan dan mengalami nilai tertinggi pada bulan Februari – hal ini sejalan dengan tingkat kegiatan sektor kesehatan pada matrik sebelumnya. Hal ini setara dengan respons, partisipasi, kompetensi dan tanggungjawab dan pemantauan. Nilai terendah ada pada evaluasi, penentuan sasaran dan pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa kita belum benar-benar melakukan kegiatan berbasis program, namun masih berorientasi pada proyek, dimana evaluasi dan pemantauan oleh publik sangat minim.

5.2.2. Cluster Makanan dan Nutrisi



Pada Cluster makanan dan nutrisi mempunyai nilai paling tinggi pada bulan Februari dan Nopember 2008, sementara di bulan – bulan yang lain nilainya rendah. Sedangkan nilai yang lumayan baik ada pada bulan September 2008. Sementara titik terendah ada pada bulan Januari, Juli dan Juni. Bila di perhatikan pada analisa pelaksanaan 8 indikator Sphere, maka nilainya hampir sama dengan pada nilai per cluster/sector.



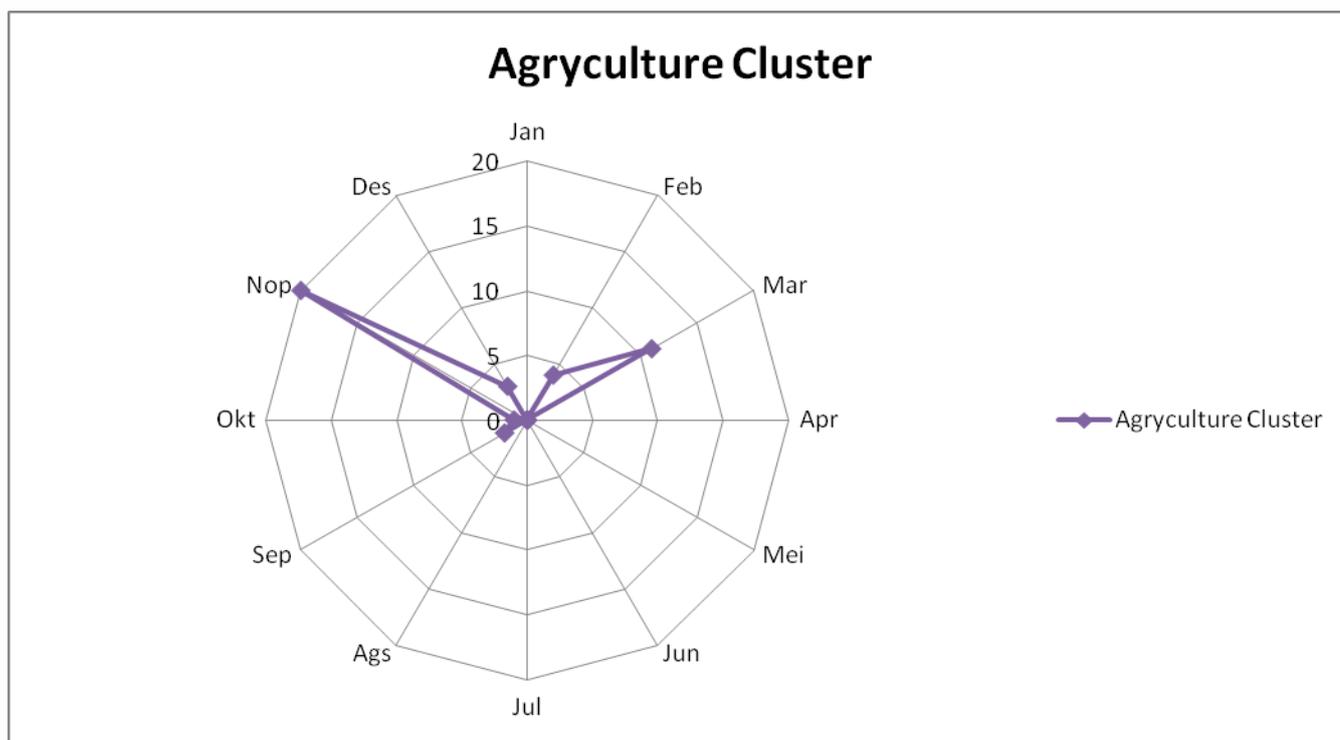
Analisis : Pada grafik di atas menunjukkan bahwa pengkajian awal mempunyai nilai tertinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Berikutnya disusul dengan partisipasi dan respon. Hal ini menunjukkan bahwa pada cluster kesehatan, pengkajian awal telah banyak dilakukan. Hal tersebut diikuti oleh partisipasi dimana partisipasi ini ditunjukkan

Penjelasan masing – masing Indikator Sphere, Cluster dan hubungan antara keduanya

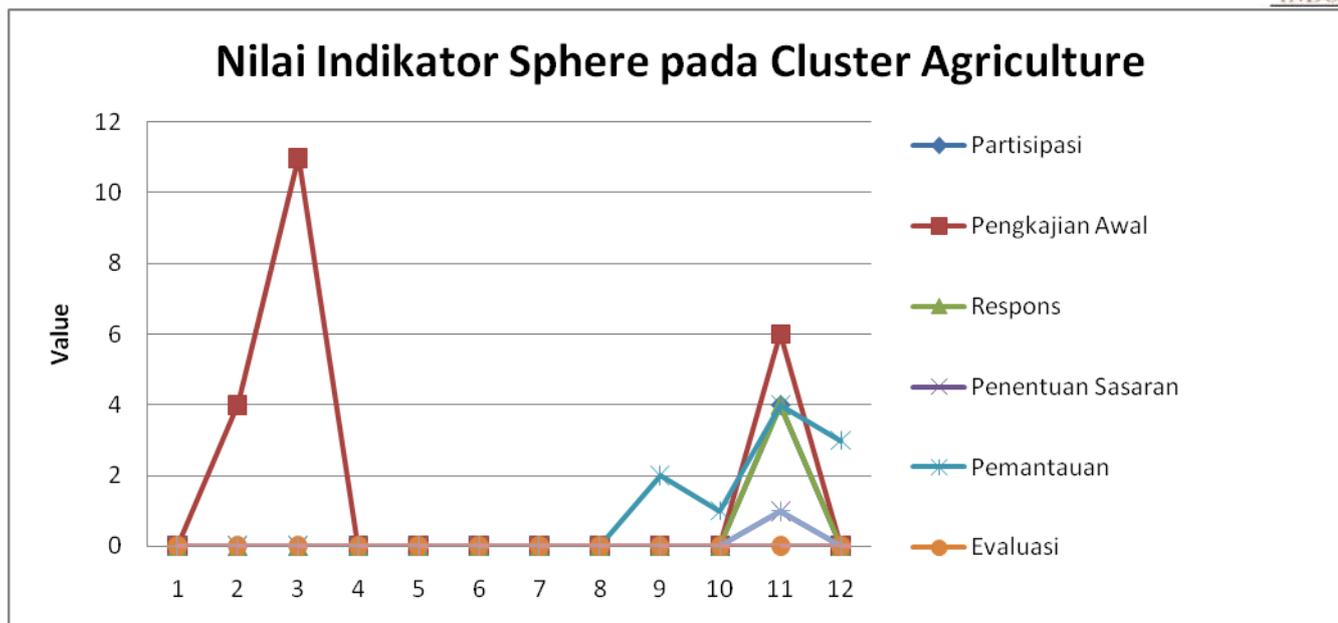
dalam data yang menyatakan bahwa ada keterlibatan yang cukup kuat pada masyarakat. Hal ini nyata ketika respon, dimana respon juga banyak dilakukan oleh clustrer kesehatan. Kompetensi dan Tanggungjawab Pekerja kemanusiaan menunjukkan nilai positif meskipun masih rendah. Sedangkan pada indikator lainnya seperti pemantauan dan supervisi managemen dan dukungan terhadap personil nilainya sangat rendah.

Rekomendasi : Pentingnya peningkatan pemantauan dan supervisi managemen karena hal ini sangat penting dalam cluster kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa dalam cluster kesehatan selain perlu kemampuan atau skill yang khusus maka pemantauan sebagai sebuah alat untuk memastikan kualitas dan akuntability pekerjaan serta supervisi menjadi sangat penting.

### 5.2.3. Cluster Agriculture

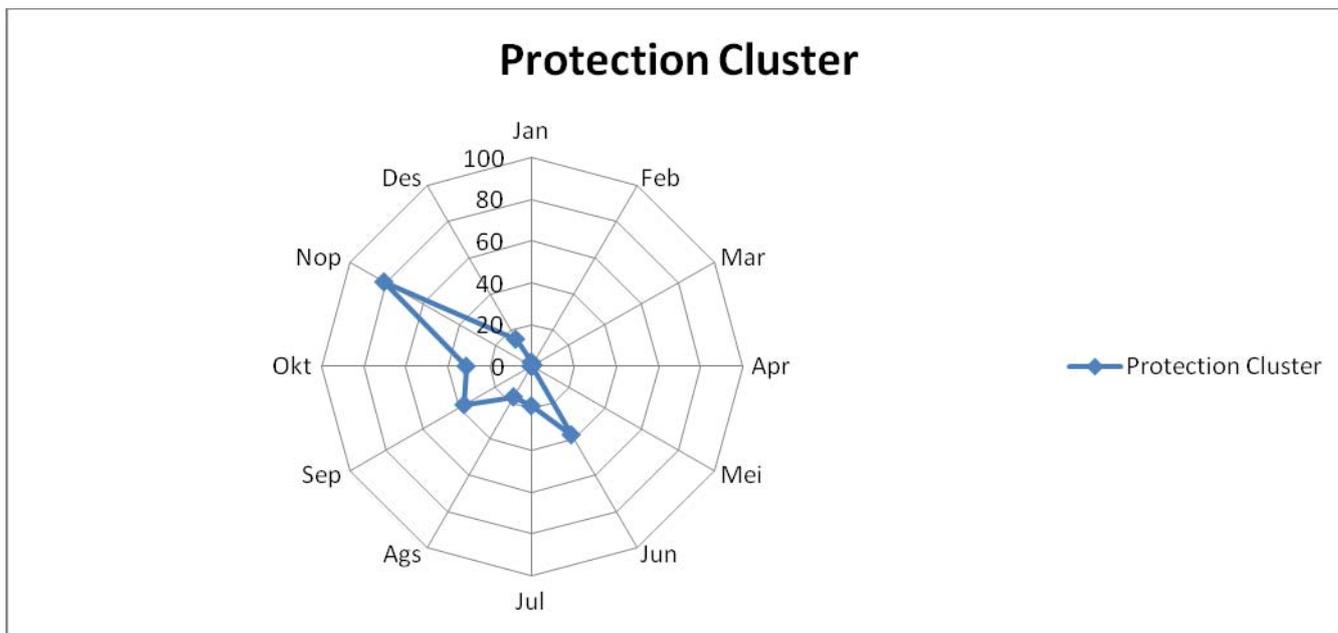


Analisa : Pada cluster agriculture, nilai tertinggi ada pada bulan Nopember yang kemudian diikuti pada bulan Maret 2008. Sedangkan pada bulan – bulan lainnya nilainya sangat rendah dan mencapai titik terendah pada bulan Mei, Juni dan Juli. Pada cluster ini sulit sekali dianalisa karena indikator untuk menilainya tidak didapatkan dengan pasti, sehingga yang memungkinkan adalah memberikan gambaran atas kegiatan cluster yang berhubungan dengan kegiatan pertanian misalnya pada saat respon mereka sekaligus memberikan bantuan tanaman, bibit, sistem pengairan yang berkontribusi langsung pada pertanian.

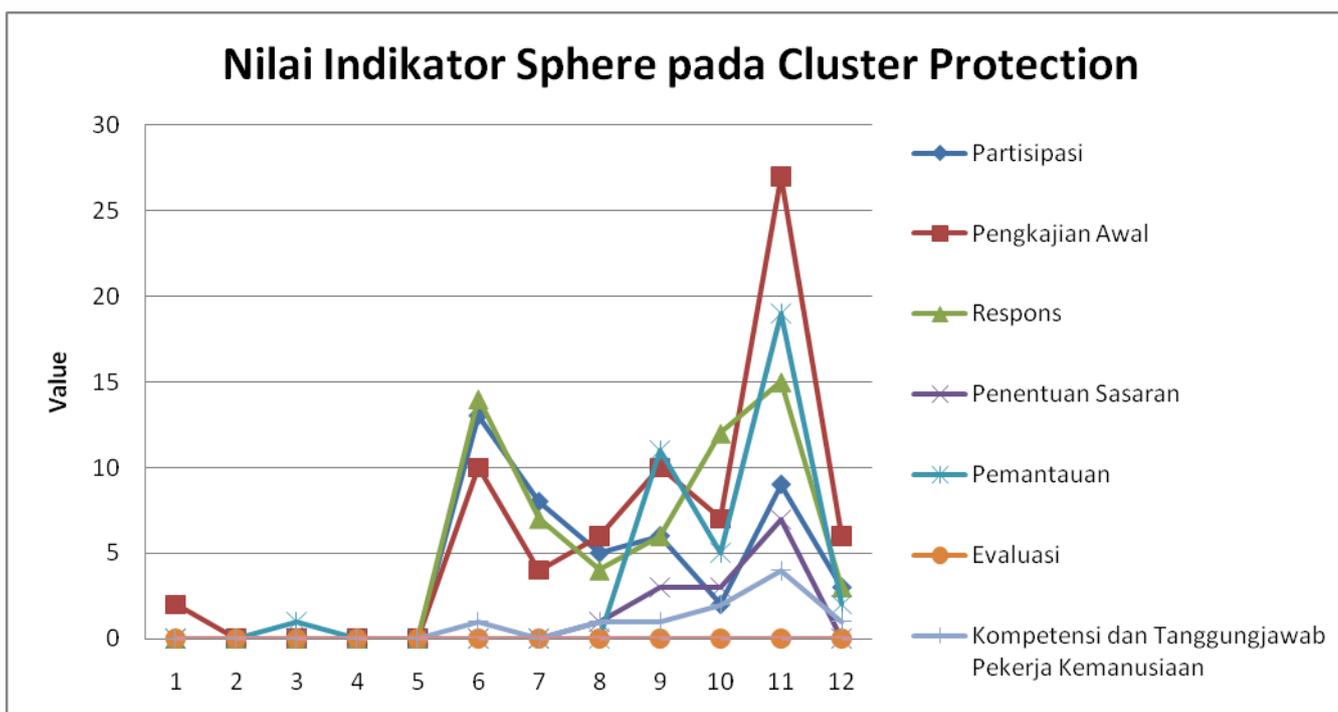


**Analisa :** Selama kurun waktu 12 bulan pada cluster pertanian, partisipasi penduduk yang terkena dampak bencana secara aktif dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program bantuan hanya terjadi pada bulan November dengan kegiatan/ aktivitas yang signifikan, hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh dampak bencana yang terjadi dan luasan kerusakan yang mempengaruhi akses pertanian secara keseluruhan pada suatu daerah. Keterlibatan/ keterwakilan semua kelompok, adanya komunikasi dan transparansi serta kemampuan setempat juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek. Tidak adanya supervisi, manajemen dan dukungan personil pada kegiatan di cluster ini mengakibatkan intervensi hanya difokuskan pada implementasi riil. Rendahnya keterlibatan sektor pertanian dalam rangka kesiapsiagaan dan tanggap darurat sehingga tingkat partisipasi di sektor ini sangat rendah, apabila di bandingkan dengan kejadian bencana yang terjadi selama kurun waktu 12 bulan .

5.2.4.. Cluster Protection



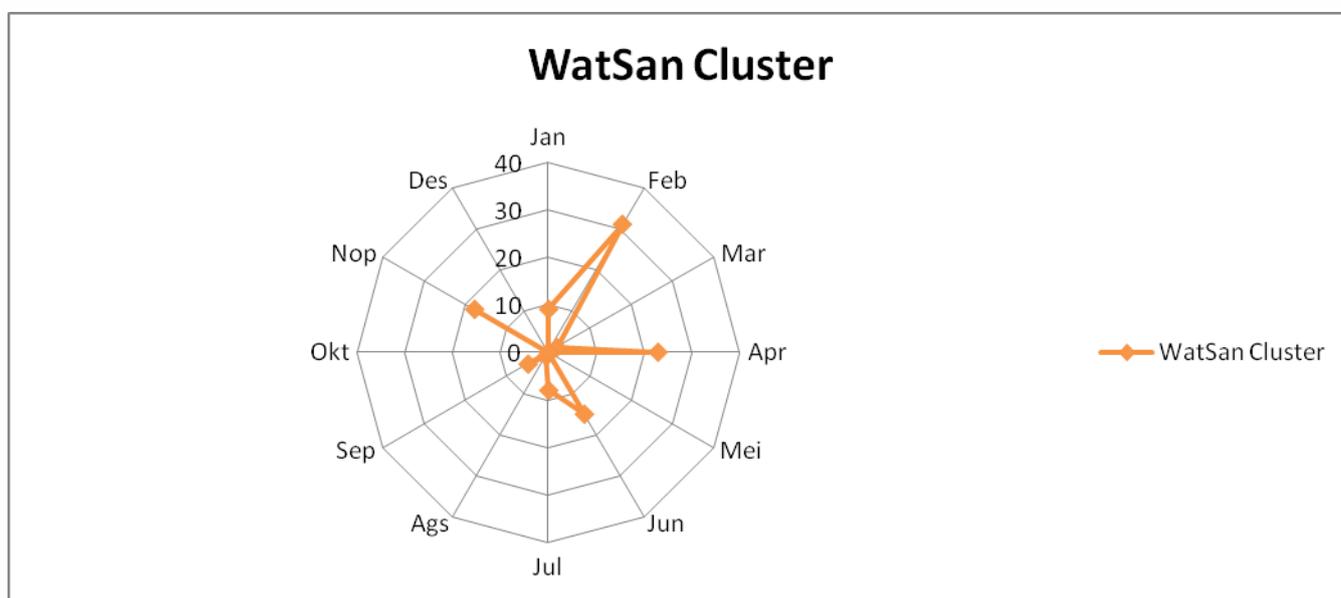
Analisa : Pada cluster Protection menggambarkan bahwa selama bulan Januari sampai dengan Mei hampir tidak ada kegiatan dan baru mulai naik pada bulan Juni 2008. Namun mengalami penurunan kembali pada bulan Juli dan Agustus, dan mulai naik kembali pada bulan September 2008. Puncak kenaikan terjadi pada bulan Nopember 2008. Pada cluster protection ini, unit analisisnya menggunakan indikator perlindungan kepada korban diantaranya adalah pemberian imunisasi, perlindungan dari HIV AID dan lain sebagainya.



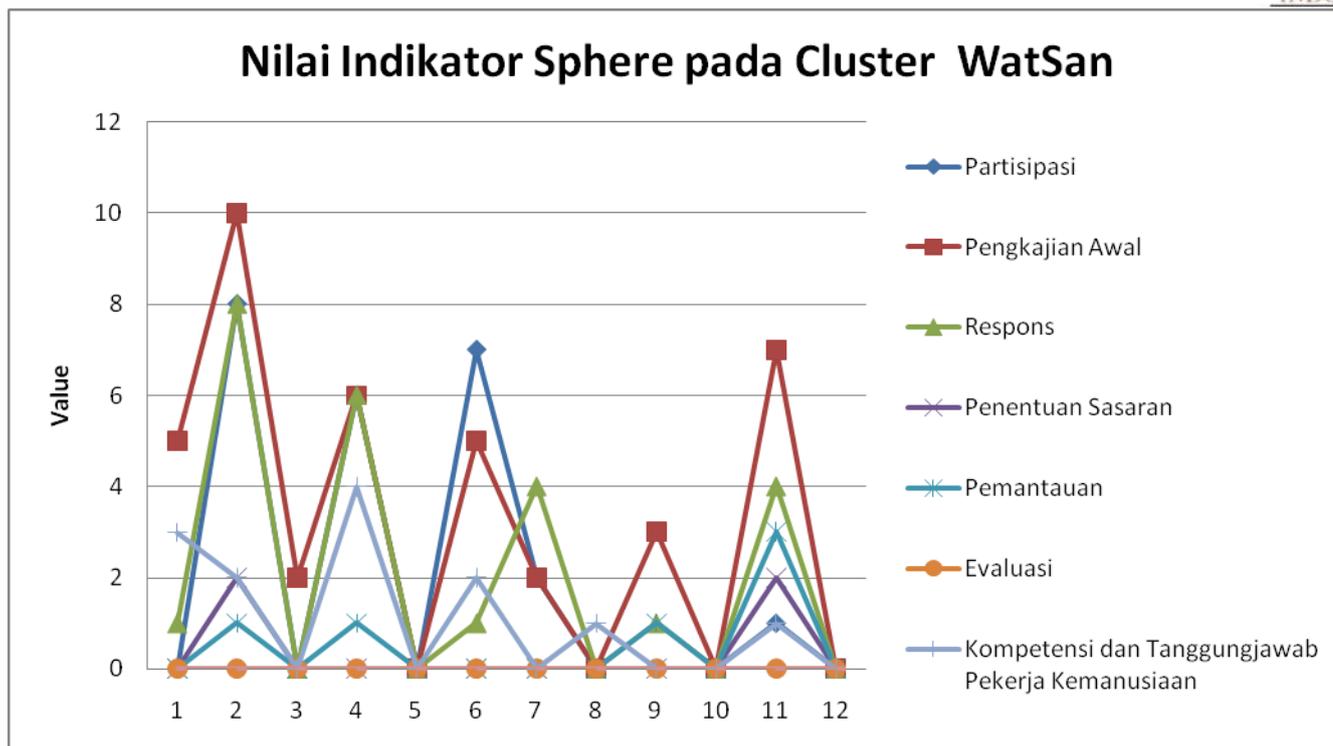
Penjelasan masing – masing Indikator Sphere, Cluster dan hubungan antara keduanya

Pada grafik di atas mempertegas analisis sebelumnya bahwa bulan Januari – Mei memang nilainya sangat rendah. Namun yang terpenting pada grafik adalah sebuah gambaran atas pelaksanaan 8 indikator sphere, dimana pengkajian awal, partisipasi, respons dan pemantauan mempunyai nilai cukup tinggi. Hal ini berbeda dengan cluster lainnya dimana pemantauan biasanya rendah, namun kali ini mempunyai nilai yang tinggi. Sedangkan pada indikator lainnya seperti evaluasi dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personel mempunyai nilai terendah. Sedangkan pada kompetensi mempunyai kenaikan yang positif dan memungkinkan untuk mengalami kemajuan karena grafiknya terus naik.

### 5.2.5. Cluster Watsan

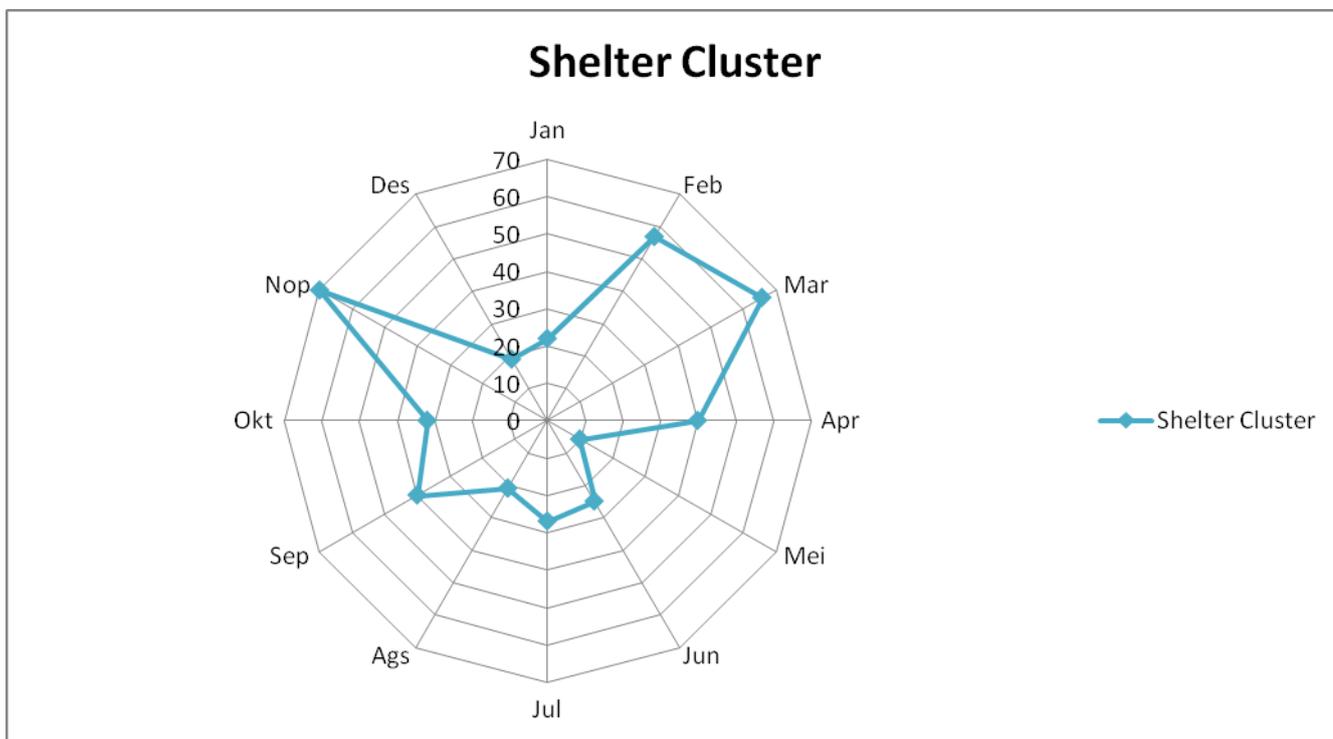


Analisa : Pada cluster Watsan, pada bulan Nopember, Februari, April dan Juni mengalami nilai yang tinggi, sedangkan pada bulan Juni, Juli dan Januari grafik menunjukkan adanya kegiatan meski tidak banyak, sedangkan bulan September sampai Oktober mengalami titik paling rendah. Sementara di bulan yang lain kegiatan Watsan tidak banyak dilaksanakan. Watsan ini mempunyai kegiatan dalam beberapa bidang diantaranya adalah dalam bidang pembuatan WC, MCK, sumur dan lainnya.



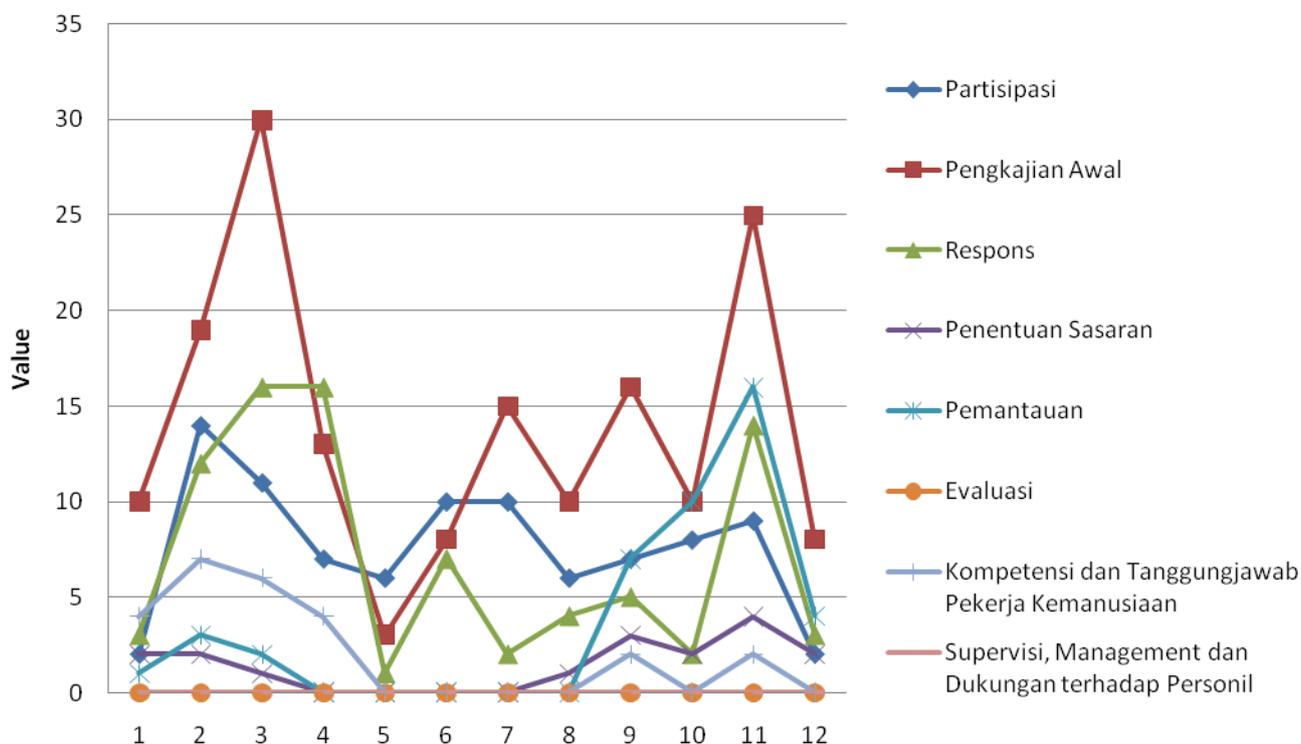
Analisis : Grafik pada cluster Watsan sangat fluktuatif, dimana 6 indikator, yaitu partisipasi, pengkajian awal, respons, penentuan sasaran, pemantauan dan kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan mempunyai nilai yang cukup baik. Yang menarik adalah pada evaluasi dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil yang sangat rendah bahkan hampir mencapai titik nol. Hal ini juga menjadi gambaran hampir di semua cluster dan indikator sphere oleh karena itu harus menjadi perhatian bagi kita semua pelaku kemanusiaan.

5.2.6. Cluster Shelter



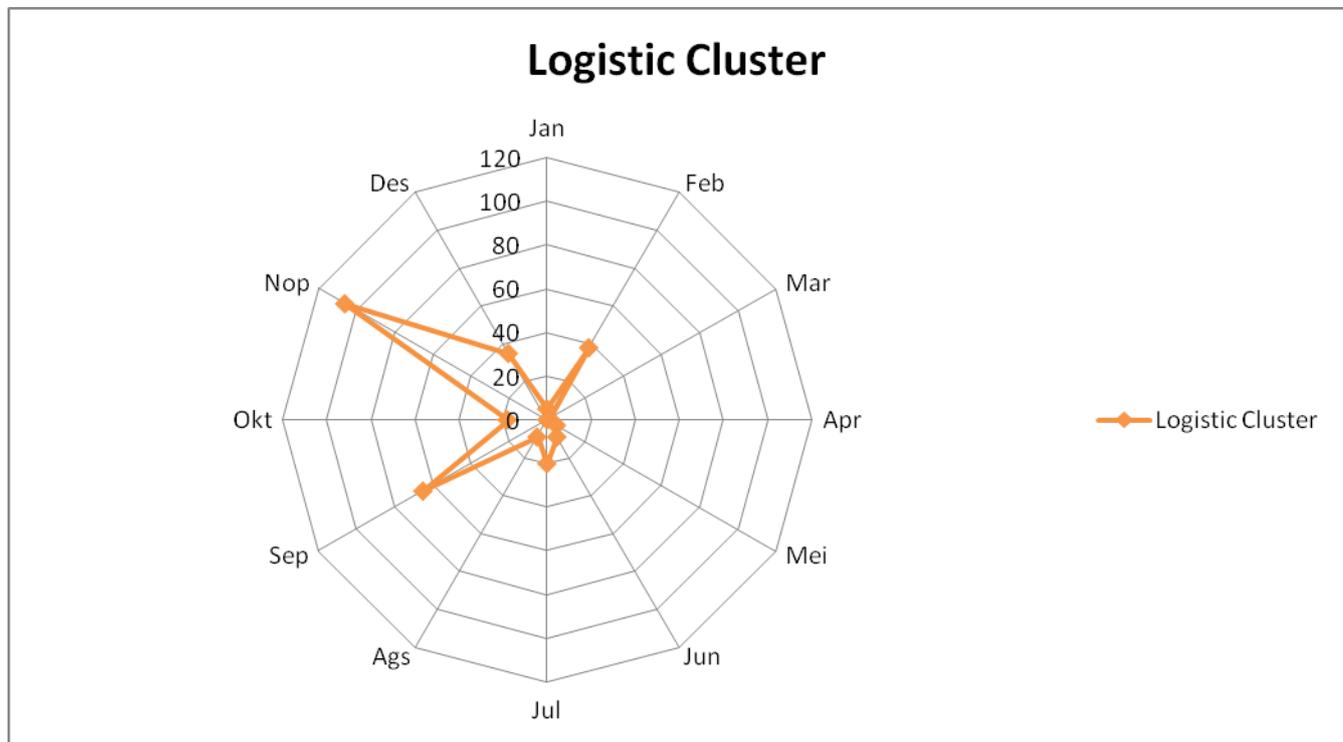
Pada cluster Shelter, kegiatan yang berjalan sangat menaik dari bulan ke bulan, karena hampir semua kegiatan berjalan dalam waktu 12 bulan, meskipun ada beberapa fluktuasi dimana ada titik – titik tertinggi dan ada beberapa yang terendah. Pada bulan November 2008 serta Maret mempunyai nilai tertinggi. Hal ini terlihat dengan beberapa fakta lapangan, dimana pada bulan tersebut terjadi banyak bencana dimana banyak sekali respon bencana yang berhubungan dengan Shelter. Namun demikian kegiatan dalam cluster ini banyak dilaksanakan hampir disemua bulan mulai Januari sampai Desember.

### Nilai Indikator Sphere pada Cluster Shelter



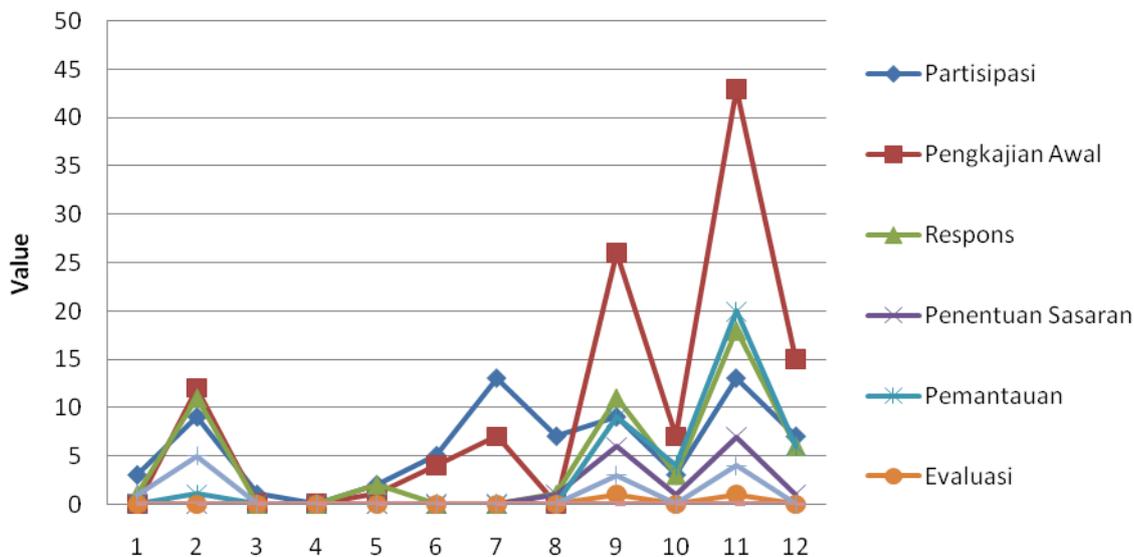
Analisa : Pada setiap kejadian bencana, kebutuhan akan tempat penampungan merupakan prioritas, hal tersebut dapat dilihat dari setiap kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, akibat dari bencana kebanyakan masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka. Hal tersebut yang menjadikan penyediaan akan penampungan menjadi prioritas. Dari grafik partisipasi di atas, mereka yang terkena dampak bencana sering memilih untuk tinggal bersama sebuah masyarakat tempatan, bersama dengan anggota keluarga yang lain atau orang-orang yang mempunyai kesamaan ikatan-ikatan sejarah, keagamaan atau yang lainnya. Dukungan dalam membuat atau mempersiapkan sarana penampungan dari masyarakat sendiri (apabila masih ada akses) atau pihak pemerintah/swasta dengan menggunakan sarana yang sudah ada di Indonesia khususnya sangatlah baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika beberapa bencana yang terjadi seperti gempa bumi di Yogyakarta, Tsunami di Aceh, dll. Hanya saja dukungan standard minimum dan indikator-indikator dalam mempersiapkan dan menyediakan sarana penampungan yang layak dan terjamin masih sangat jauh. Untuk itu penting sekali diperhatikan indikator-indikator SPHERE. Lemahnya supervisi dan evaluasi pada setiap kegiatan persiapan dan penyediaan sarana penampungan serta kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan yang masih sangat jauh kurang menjadikan prioritas kita untuk mengutamakan koordinasi dan strategi solusi. Beberapa contoh yang terjadi hingga saat ini masih banyak korban tsunami 2004 yang sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat hunian.

## 5.2.7. Cluster Logistik



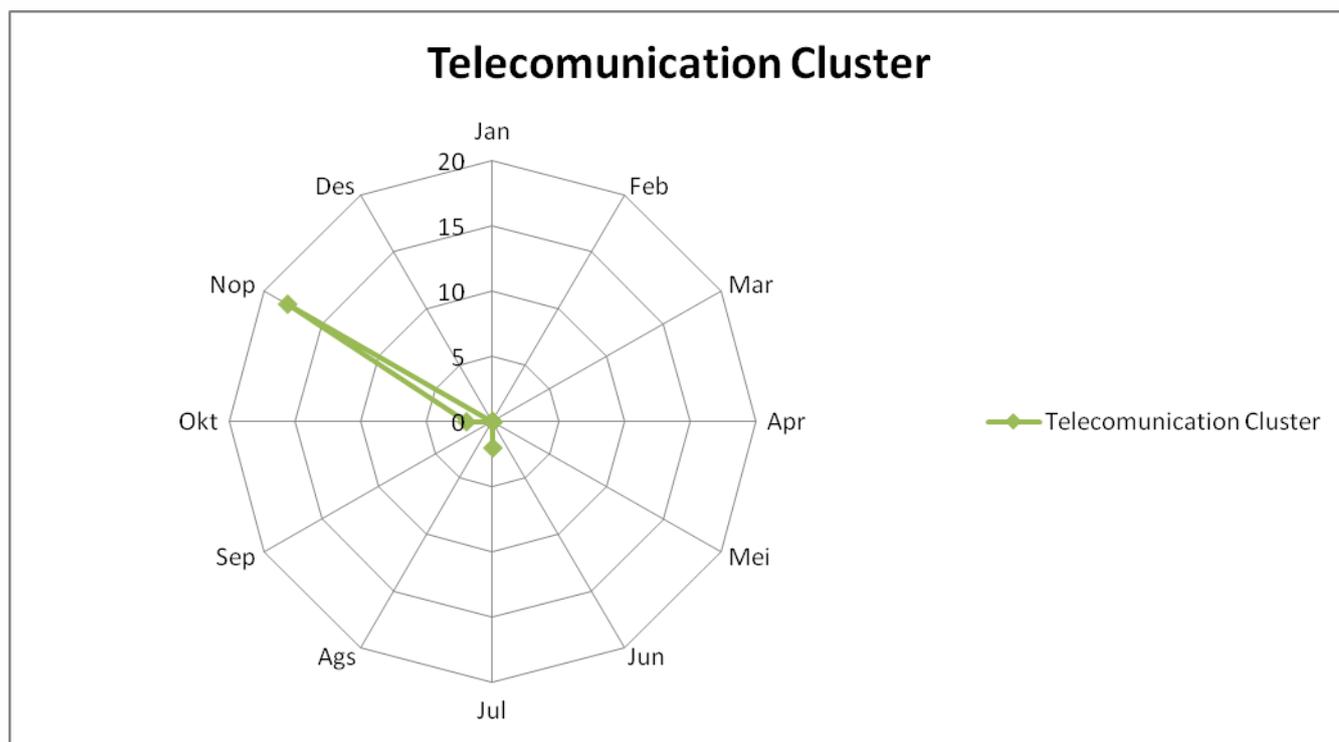
Analisa : Sama halnya dengan analisis cluter lainnya, dimana pada bulan Nopember 2008 kegiatan dalam cluster Logistik banyak dilakukan. Hal itu di susul pada bulan September 2008. Sementara titik – titik terendah ada pada beberapa bulan, diantaranya pada bulan Mei, Juni dan Juli. Dan di bulan – bulan tersebut memang jarang terjadi bencana. Yang dilakukan pada cluster ini diantaranya adalah pengiriman logistik dan paling banyak pada stock makanan.

### Nilai Indikator Sphere pada Cluster Logistic

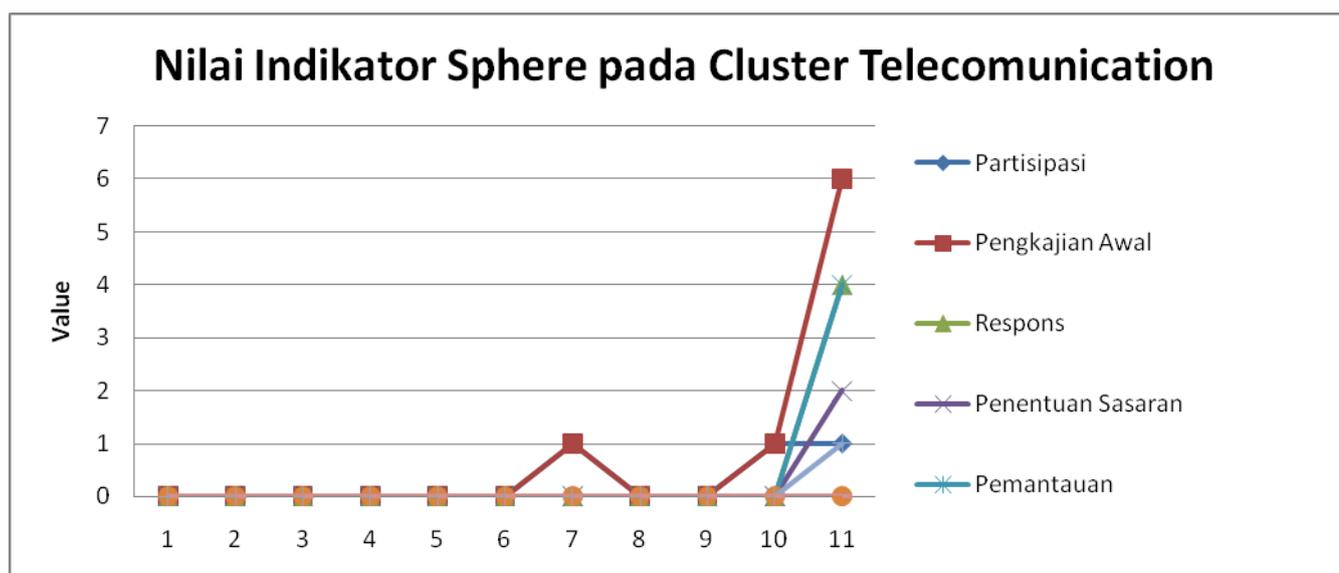


Grafik ini menunjukkan bahwa kegiatan pada cluster Logistic pada partisipasi mempunyai nilai yang sangat fluktuatif, dimana ada gerakan grafik di awal bulan sampai Februari dan mengalami penurunan sampai bukan grafik mulai naik kembali pada bulan Juni dan mencapai porsi partisipasi tertinggi pada bulan Juli 2008. Untuk respon dan pemantauan mengalami kenaikan mulai bulan Agustus 2008 sampai November 2008. Nilai tertinggi bisa dilihat pada pengkajian awal, dimana cluster ini melakukan pengkajian awal hampir diseluruh bencana di setiap bulan. Sementara nilai terendah ada pada bulan evaluasi, supervisi dan pemantauan.

5.2.8. Cluster Telekomunikasi



Pada cluster ini menunjukkan bahwa bulan Nopember 2008 kegiatan cluster ini nilainya sangat tinggi, sementara pada bulan lainnya nilainya sangat rendah, bahkan hampir mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa cluster ini sangat jarang padahal ini sangat penting sebagai sebuah akuntabiliti kepada publik sekaligus penting untuk koordinasi dengan para pihak.

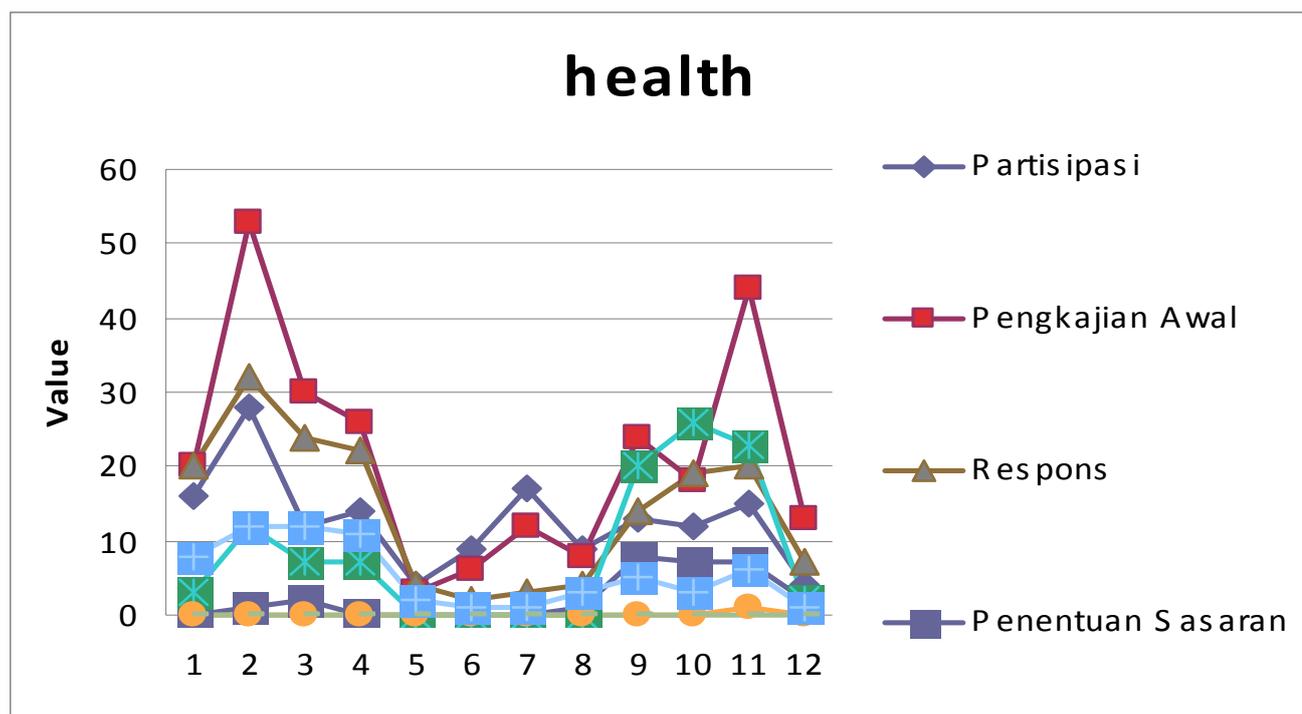


Pada grafik ini menunjukkan bahwa bulan Januari sampai Juni 2008 indikator sphere tidak dilaksanakan dan hampir mendekati titik nol. Baru mulai ada kegiatan pada bulan Juli 2008 dalam pengkajian awal. Pada bulan ke – 9, pengkajian awal mulai naik lagi dan mengalami puncak pada bulan November 2008. Selain itu cluster ini juga melakukan

kegiatan dalam pemantauan, penentuan sasaran dan partisipasi, namun semuanya ada pada bulan November. Bulan ini bencana banyak terjadi, terutama pada kejadian banjir.

### 5.3. Interaksi antara Indikator Sphere dengan berbagai cluster

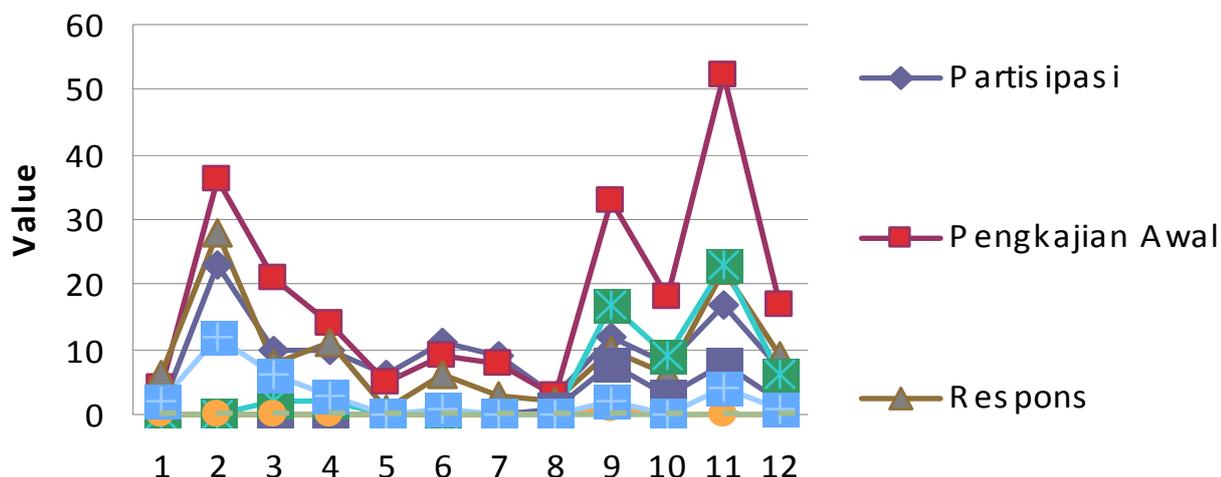
#### 5.3.1. Indikator sphere dengan Health



Analisa : Pada cluster health menunjukkan bahwa dari 8 indikator Sphere hanya soal Partisipasi, pengkajian awal, respons dan penentuan sasaran yang dilaksanakan. Ini artinya masih ada 4 indikator lagi yang tidak dilaksanakan yaitu pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan Supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil. Hal yang menunjukkan kecenderungan positif adalah upaya pengkajian yang cukup mendapat perhatian pada bulan-bulan terjadi bencana sehingga mampu pada suatu saat melonjak tajam, sehingga ada korelasi yang jelas antara pengkajian awal dan respons yang dilakukan oleh cluster ini. Sudah tentu partisipasi juga meningkat sehubungan dengan respons yang dilakukan. Namun keberlanjutan cluster ini menjadi kurang meyakinkan karena ketiadaan pemantauan dan evaluasi untuk keempat indikator yang sudah dilakukan. Juga adalah hal yang perlu di cermati bahwa cluster yang memerlukan tenaga professional justru tidak menunjukkan indikator untuk kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil.

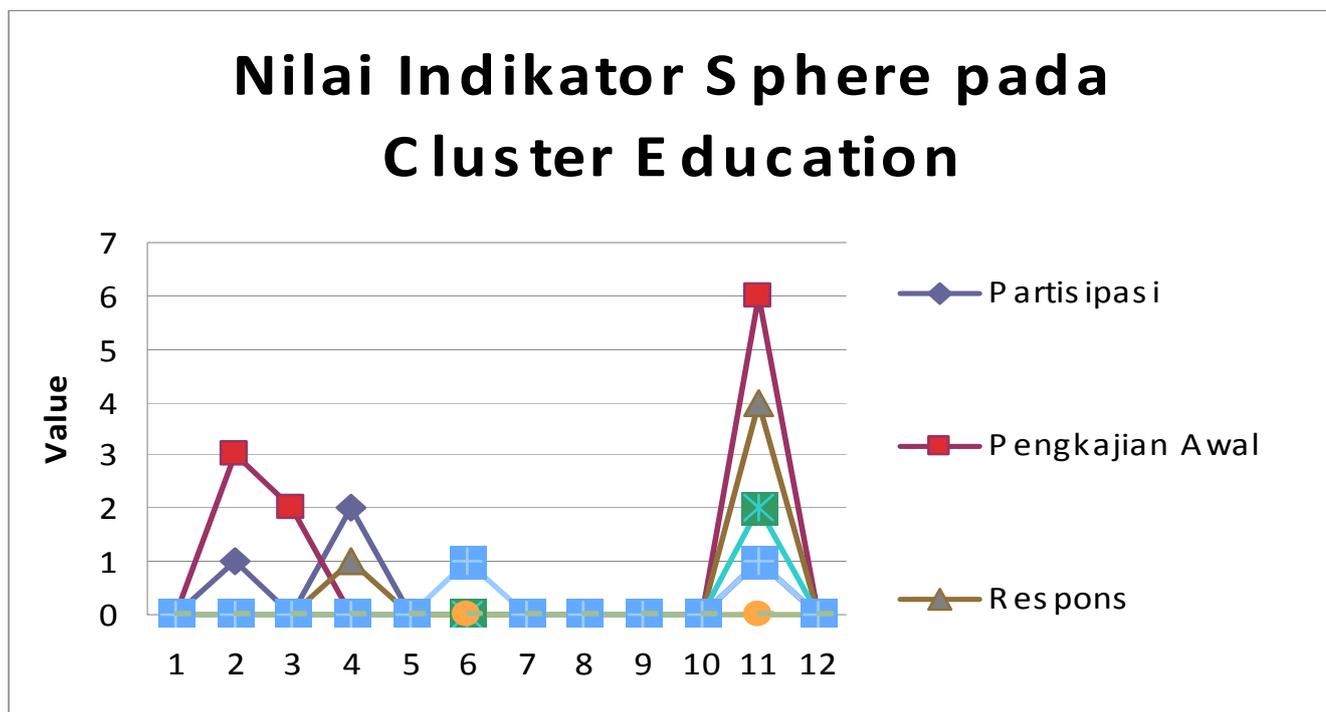
## 5.3.2. Indikator Sphere dengan Cluster Food and Nutrition

## Nilai Indikator Sphere pada Cluster Food & Nutrition



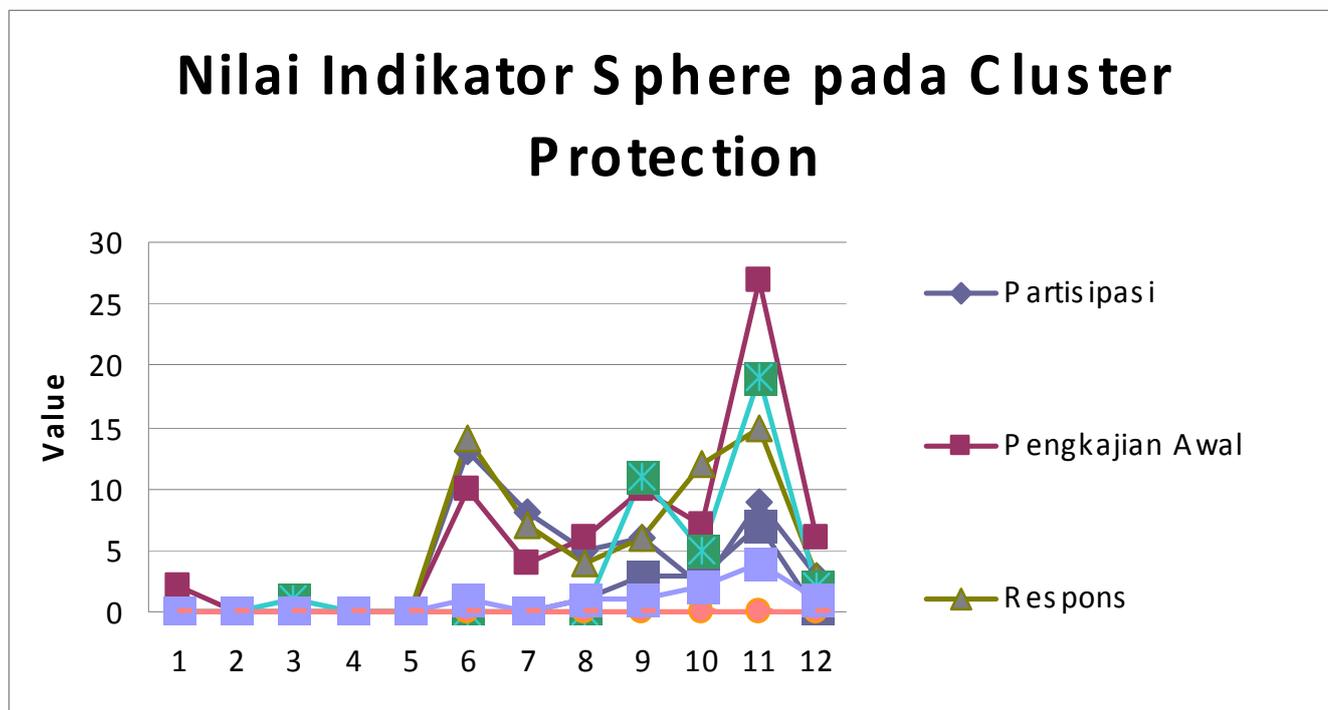
Analisa: Pada Cluster Food dan Nutrition, hanya 3 indikator dari 8 yang ada yaitu Partisipasi, Pengkajian Awal dan Respons. Ketiadaan penentuan sasaran sebagai indikator menunjukkan bahwa pengkajian awal dan respons bisa saja tidak menjadi tepat sasaran bila tidak hadirnya penentuan sasaran yang jelas. Elemen indikator evaluasi dan pemantauan juga nihil dalam cluster ini sehingga memungkinkan ketiadaan tindak lanjut untuk respons yang telah diberikan. Dua indikator lain, yaitu kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil, juga tidak ada dalam cluster ini sehingga mengurangi ketajaman pelaksanaannya di lapangan.

## 5.3.3. Indikator dengan cluster education



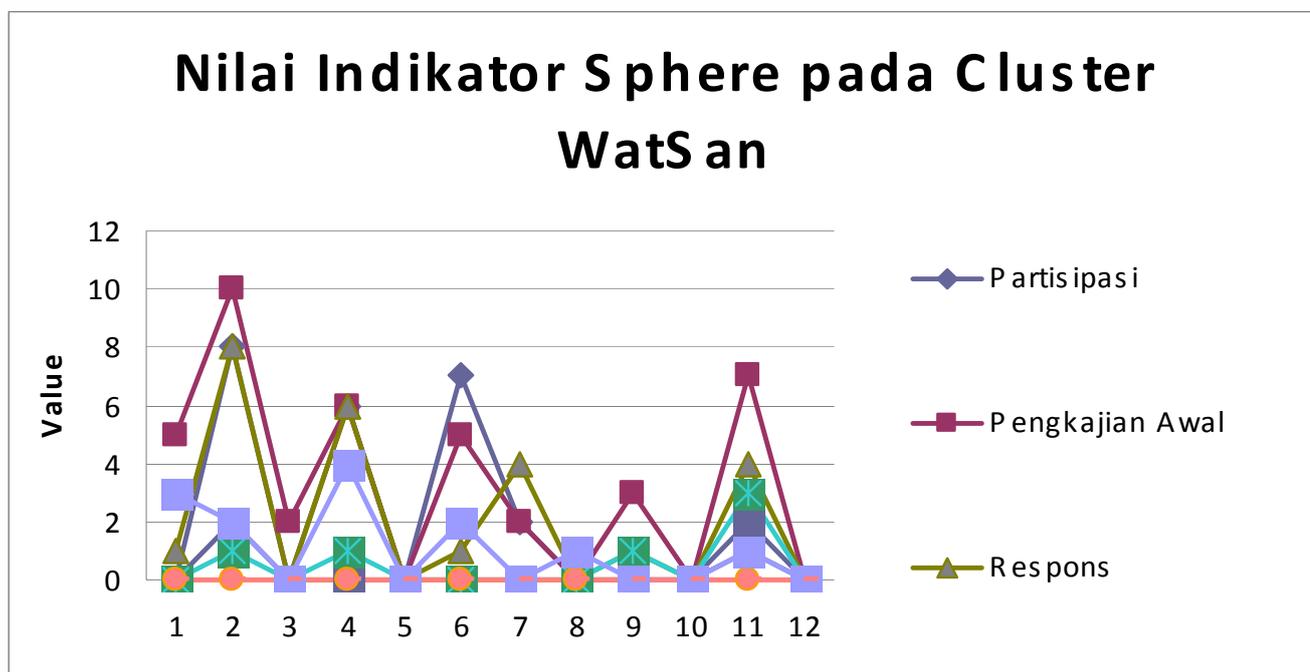
Analisa: Pada cluster Education, hanya 3 indikator yang bisa dilaporkan dan dari ketiga itu ada titik dimana tidak ada sama sekali indikator yang bias dilaporkan pada cluster ini, yaitu antara bulan 5 sampai dengan bulan 9. Lima indikator tidak tercatat dalam cluster ini yaitu penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan, serta supervisi, manajemen, dan dukungan terhadap personnel. Ketiadaan 5 indikator ini dan ketidakhadiran keseluruhan indikator pada waktu tertentu menunjukkan bahwa cluster education belum menjadi prioritas dalam upaya-upaya pemenuhan standar Sphere yang diperlukan.

## 5. 3.4. indikator dengan Cluster Protection



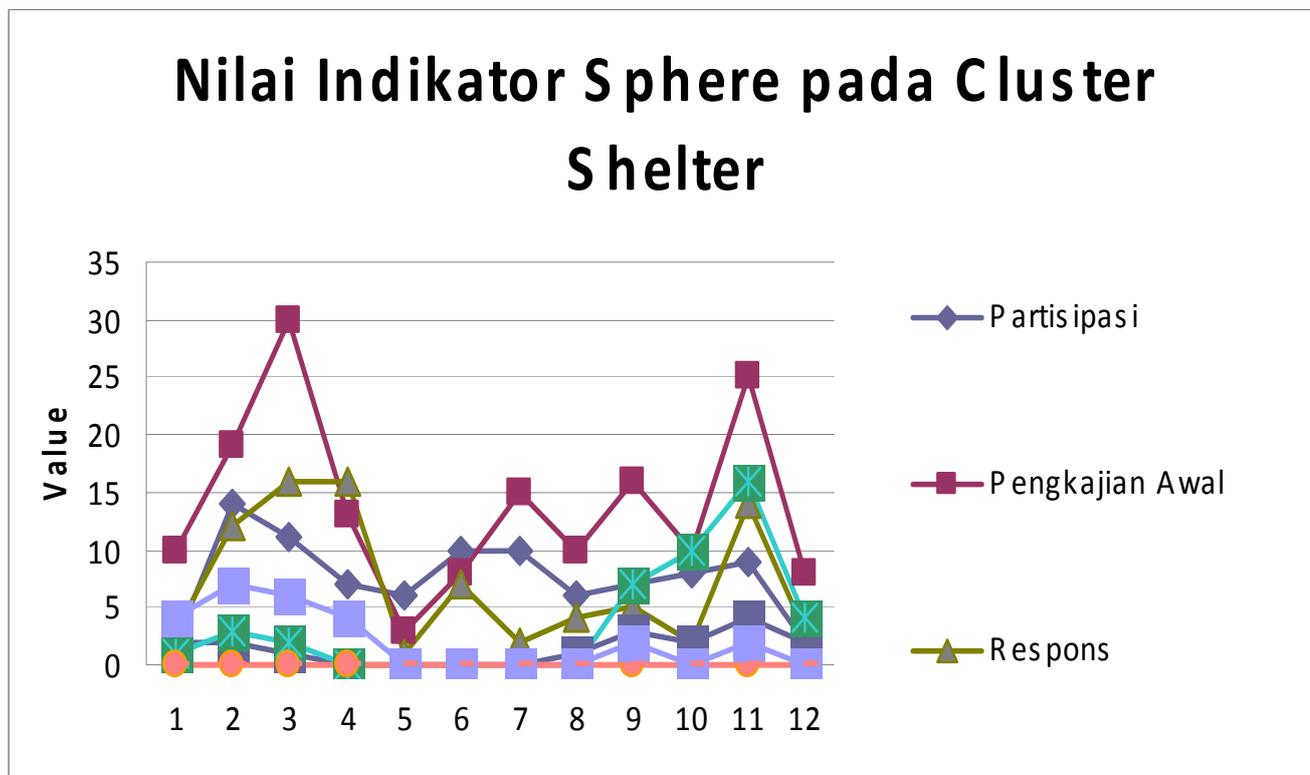
Analisa: Pada cluster Protection, hanya 3 indikator yang tercatat, yaitu Partisipasi, Pengkajian awal dan Respons. 5 indikator tidak tercatat sama sekali dalam cluster ini, yaitu Penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil. Ada elemen indikator yang sangat penting seperti supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil tidak terdata sehingga menjadikan cluster protection ini rentan terhadap keberadaannya dalam memenuhi standar Sphere yang minimal. Kendati 3 Indikator masih terdata, namun ada juga rentang waktu dimana tidak ada sama sekali tercatat dalam pelaksanaan cluster ini

### 5.3.5. Indikator dengan Cluster Watson



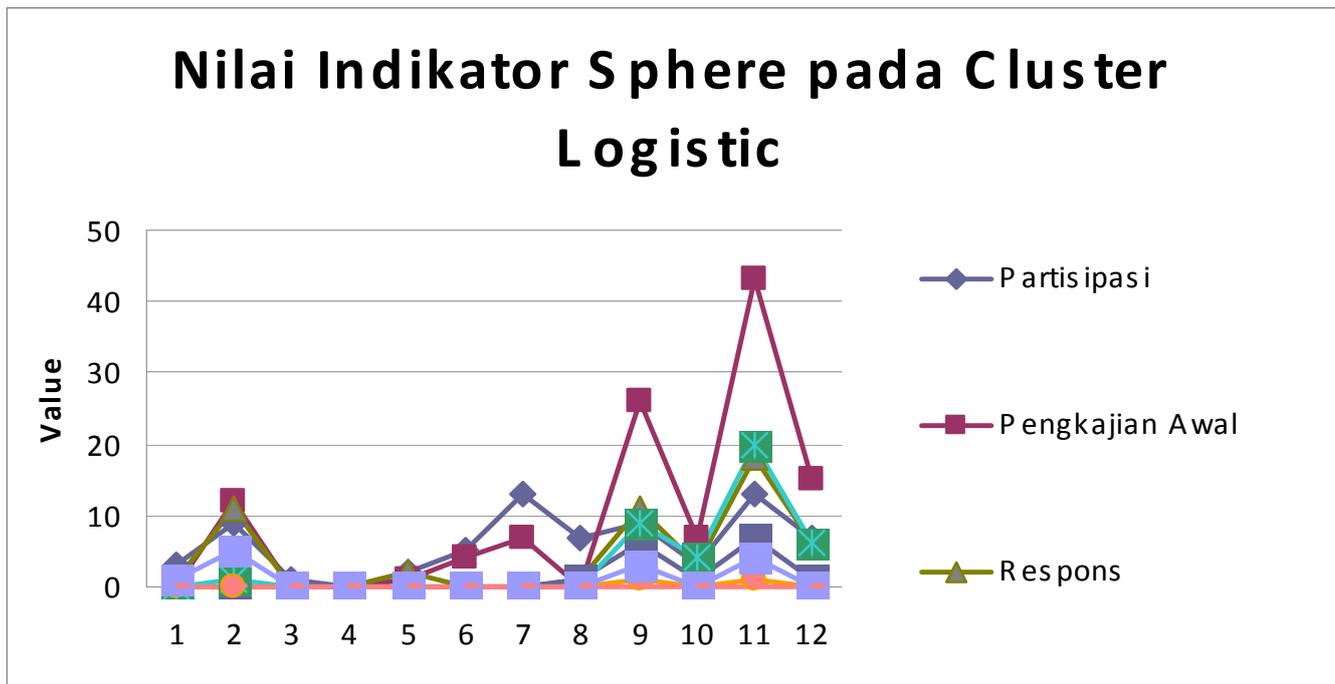
Analisa : dalam Cluter WatSan ini tercatat 3 Indikator yang hampir secara konsisten sepanjang tahun dilaksanakan. Namun demikian ada 5 indikator yang tidak terdata dalam pelaksanaan pemenuhan upaya WatSan ini. 5 Indikator yang tidak tercatat sama sekali dalam cluster ini adalah Penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil. Sudah tentu ketiadaan pemantauan dan evaluasi serta penentuan sasaran sangat berpengaruh dalam keberlanjutan cluster WatSan ini. Juga dalam pelaksanaannya diperlukan tenaga dengan kapasitas khusus dan supervisi yang jelas, sehingga ketiadaan indikator kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil pasti akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemenuhan cluster ini

5.3.6. Indikator Sphere dengan Shelter



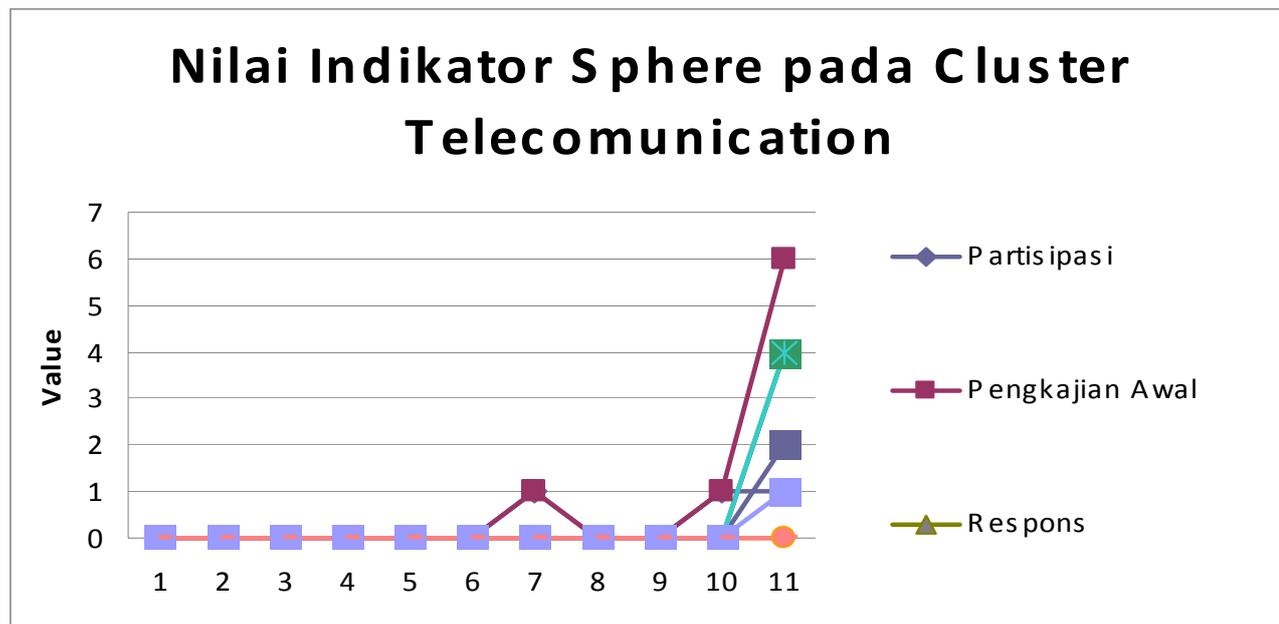
Analisa : Dalam cluster shelter ada 3 indikator yang tercatat yaitu Partisipasi, Pengkajian Awal dan Respons. Ada 5 indikator lain yang tidak terdata yaitu, Penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil. Dalam pelaksanaannya, indikator pangkajian awal menunjukkan tingkat pelaksanaan yang cukup tinggi, khususnya pada bulan ketiga dan ke sebelas. Sementara itu ketiadaan 5 indikator lain dalam pelaksanaan shelter sesungguhnya sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan cluster ini, apalagi bila indikator pemantauan dan evaluasi tidak hadir, maka pelaksanaan shelter ini menjadi tidak akan berkelanjutan.

## 5.3.7. Indikator dengan cluster logistik



Analisa : pada cluster Logistic ini, hanya 3 indikator yang dapat dicatat yaitu Partisipasi, Pengkajian awal dan Respons. Ini artinya masih ada 5 indikator lagi yang tidak dilaksanakan yaitu Penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan Supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil. Dalam pelaksanaan 3 indikator diatas, cluster logistic juga menunjukkan bahwa indicator Pengkajian Awal menunjukkan titik pencapaian yang tinggi pada bulan ke 11. Sementara indicator pemantauan dan evaluasi masih belum tercatat.

## 5.3.8. Indikator dengan cluster Telecommunication



Analisa: Pada cluster telecommunication, menunjukkan bahwa dari 8 indikator Sphere hanya soal Partisipasi, pengkajian awal, dan respons yang dilaksanakan. Ini artinya masih ada 5 indikator lagi yang tidak dilaksanakan yaitu penentuan sasaran, pemantauan, evaluasi, kompetensi dan tanggungjawab pekerja kemanusiaan dan Supervisi, manajemen dan dukungan terhadap personil. Pada cluster ini tercatat ketidakhadiran cluster ini dalam 6 bulan pertama di tahun 2008. Dari 3 indikator Sphere, yang paling menonjol adalah indikator Pengkajian Awal yang menunjukkan kehadiran dalam rentang waktu yang lebih banyak dan tingkat Value yang paling tinggi.

**Indonesia Humanitarian Report 2008**



**LAMPIRAN**

## Lampiran :

## 1. Jumlah bencana

No	BULAN	Bencana												Jumlah Bencana Per-bulan
		Banjir	Puting Beliung	Angin kencang	Keracunan	Gempa	Tanah longsor	Gunung meletus	Gelombang pasang	Kerusuhan	Kecelakaan pesawat	Kebakaran	Lain-lain	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Januari	5				2	1							8
2	Februari	11	2	2		2	3		3					23
3	Maret	17	5	1			4							27
4	April	12	2				2	1						17
5	Mei	3	2			1	1							7
6	Juni	3	1			1	5							10
7	Juli	7	2	1			3					1		14
8	Agustus	4	2			2	2		1			1		12
9	September	22	3		2	1	3						1	32
10	Oktober	18	17		1		6	1		1				44
11	November	16	5			2	2			1				26
12	Desember	9	2				3		1		1			16
	Jumlah Per-jenis Bencana	127	43	4	3	11	35	2	5	2	1	2	1	236

## Lampiran 2 : Indikator Sphere

## Matriks for Humanitarian Forum Indonesia Report

NO	SPHERE													
<b>1</b>	<b>Partisipasi</b>	Value												
1.1	Semua orang mempunyai informasi dan akses soal bantuan	10	50	22	20	9	17	15	10	6	2	0	0	161
1.2	Bantuan harus mencerminkan kebutuhan, masalah dan nilai	12	29	10	16	8	19	22	10	28	26	58	20	258
1.3	Program bantuan yang dirancang harus memaksimalkan ketrampilan dan kemampuan setempat.	0	4	2	3	1	19	6	10	13	6	12	3	79
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Pengkajian Awal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Informasi yang dikumpulkan dengan cara yang baku (ada checklist, ketepatan waktu, pengkajian, dll)	14	34	25	18	0	0	0	0	7	1	6	0	105
2.2	Pengkajian mempertimbangkan sektor teknis (air, gizi, pangan, hunian, kesehatan) dan lingkungan (sosial, politik, keamanan)	7	30	20	8	5	13	13	8	13	9	33	4	163
2.3	Melalui konsultasi dan memperhitungkan respons setempat	1	2	0	0	0	0	0	0	10	6	25	5	49
2.4	Teridentifikasinya kemampuan setempat	0	1	0	0	0	0	0	0	22	7	30	8	68
2.5	Data dipilih sesuai dengan jenis kelamin dan umur	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

2.6	Pengkajian di dasarkan hak	0	0	0	0	0	0	0	0	19	14	46	13	92
2.7	Pengkajian mempertimbangkan tanggungjawab pemerintah setempat	7	45	30	25	7	19	16	7	26	17	49	22	270
2.8	Pengkajian mencakup analisis lingkungan dan faktor keselamatan	2	2	4	3	0	10	4	5	6	5	27	4	72
2.9	. Jumlah penduduk di cek ulang	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	3	12
2.10.	Hasil pengkajian tersedia bagi sektor- sekr lain	10	21	17	5	0	0	4	7	2	0	0	0	66
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Respons</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	. Program fokus pada penyelamatan hidup/nyawa	8	51	26	30	5	7	5	7	19	24	36	10	228
3.2	Proyek dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan (kalau bisa melampaui standart Sphere)	18	13	14	8	0	6	2	0	9	5	23	9	107
3.3	. Ada koordinasi dan pertukaran informasi	4	27	8	18	3	15	9	8	13	13	24	9	151
3.4	Lembaga yang tidak dapat memenuhi standart diharap menginformasikan kelembaga lain	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	11	0	16
3.5	Dalam situasi konflik, bantuan harus peka terhadap situasi	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0	15
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Penentuan Sasaran</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kreteria penentuan Sasaran harus memperhatikan analisis kerentanan	2	5	3	0	0	0	0	0	16	11	32	7	76

4.2	Mekanisme penentuan sasaran disepakati bersama	0	0	0	0	0	0	0	5	6	3	0	0	14
4.3	Mekanisme dan penentuan sasaran tidak boleh mengabaikan martabat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4.4	Sistem distribusi dipantau	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	0	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Pemantauan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Informasi dikumpulkan tepat waktu	0	14	5	5	0	0	0	0	25	18	43	7	117
5.2	Ada sistem informasi	4	2	0	4	0	0	0	0	38	34	63	13	158
5.3	Semua orang dimintai pendapatnya dalam pemantauan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5.4	Ada sistem aliran informasi	0	1	7	0	0	0	0	0	4	2	8	3	25
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Evaluasi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Program dievaluasi dengan mengacu pada tujuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Evaluasi mempertimbangkan pandangan dan pendapat penduduk yang terkena bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Pengumpulan informasi bersifat independen dan imparial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
6.4	Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan masa depan praktek bantuan kemanusiaan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Kompetensi dan Tanggungjawab Pekerja Kemanusiaan</b>	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0										
7.1	Pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi teknis	18	38	24	22	2	6	0	5	13	4	22	3	157
7.2	Staff memahami potensi ketegangan dan sumber konflik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
7.3	Staff mengenali tindakan yang melecehkan, diskriminatif atau menyalahi aturan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Supervisi, Management dan Dukungan terhadap Personil</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Para maneger mn memastikan keamanan bagi staff-nya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Staff teknis dan managerial diberi pelatihan dan dukungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		118	371	217	186	40	133	96	82	316	213	570	143	<b>2485</b>

## Lampiran 3 : Matrik Cluster

Month	Health Cluster	Food & Nutrition Cluster	Education Cluster	Agryculture Cluster	Proterction Cluster	WatSan Cluster	Shelter Cluster	Logistic Cluster	Telecommunication Cluster
Jan	67	13	0	0	2	9	22	5	0
Feb	138	99	4	4	0	31	57	38	0
Mar	87	47	2	11	1	2	66	1	0
Apr	80	40	3	0	0	23	40	0	0
Mei	13	12	0	0	0	0	10	5	0
Jun	18	27	1	0	38	15	25	9	0
Jul	33	20	0	0	19	8	27	20	2
Ags	25	9	0	0	17	1	21	9	0
Sep	84	83	0	2	37	5	40	65	0
Okt	85	44	0	1	31	0	32	18	2
Nop	116	126	15	20	81	18	70	106	18
Des	29	42	0	3	15	0	19	35	0